

JULLIMURSYIDA, Ph.D
DR. M. SAYUTI, ST, M.Sc
DR. MARIYUDI, SE, MM
DR. TEUKU ZULKARNAEN, SE, MM

**MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SEKITAR TAMBANG BATUBARA
BERBASIS SINERGITAS
STAKE-HOLDER DAN MANAJEMEN EKOREGION
UNTUK MENGGERAKKAN EKONOMI RAKYAT
DI PROVINSI ACEH**

**MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SEKITAR TAMBANG BATUBARA BERBASIS
SINERGISITAS STAKEHOLDER DAN
MANAJEMEN EKOREGION UNTUK
MENGGERAKKAN EKONOMI RAKYAT DI
PROVINSI ACEH**

JULLIMURSYIDA, Ph.D
DR. M. SAYUTI, ST, M.S.c
MARIYUDI, SE, MM
TEUKU ZULKARNAEN, SE, MM

**MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SEKITAR TAMBANG BATUBARA BERBASIS
SINERGISITAS STAKEHOLDER DAN
MANAJEMEN EKOREGION UNTUK
MENGGERAKKAN EKONOMI RAKYAT DI
PROVINSI ACEH**

UNIMAL **PRESS**

Judul: **MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR TAMBANG BATUBARA BERBASIS SINERGISITAS STAKEHOLDER DAN MANAJEMEN EKOREGION UNTUK MENGGERAKKAN EKONOMI RAKYAT DI PROVINSI ACEH**

viii + 96 hal., 15 cm x 23 cm

Cetakan Pertama: Mei, 2017

Hak Cipta © dilindungi Undang-undang. *All Rights Reserved*

Penulis:

JULLIMURSYIDA, Ph.D

DR. M. SAYUTI, ST, M.S.c

MARIYUDI, SE, MM

TEUKU ZULKARNAEN, SE, MM

Perancang Sampul:

Penata Letak: Eriyanto

Pracetak dan Produksi: **Unimal Press**

Penerbit:

UNIMAL PRESS

Unimal Press

Jl. Sulawesi No.1-2

Kampus Bukit Indah Lhokseumawe 24351

PO.Box. 141. Telp. 0645-41373. Fax. 0645-44450

Laman: www.unimal.ac.id/unimalpress.

Email: unimalpress@gmail.com



ISBN: **978 – 602 –1373- 82-8**

Dilarang keras memfotocopy atau memperbanyak sebahagian atau seluruh buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena berkat rahmat dan karunia Nya peneliti telah dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian dan juga laporan penelitian ini, Selanjutnya selawat dan salam peneliti hantarkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Penelitian ini berjudul “Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang Batubara Berbasis Sinergisitas Stakeholder dan Manajemen Ekoregion Untuk Menggerakkan Ekonomi Rakyat di Provinsi Aceh”, yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari tiga kegiatan lainnya dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Universitas Malikussaleh Lhokseumawe.

Dalam penulisan laporan penelitian ini peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk menghadirkan objektivitas dari hasil penelitian, namun peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan peneliti sebagai manusia yang banyak memiliki kelemahan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan ini.

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Direktorat Penelitian Pengabdian Masyarakat (DP2M) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, yang telah membina dan mendanai penelitian ini.
2. Bapak Prof. Dr. Apridar, SE, M.Si selaku Rektor Universitas Malikussaleh beserta seluruh staf yang bersedia membantu dan berkoordinasi serta memfasilitasi terlaksananya kegiatan ini.
3. Bapak Ir. T. Hafli, MT selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh, dan Wahyuddin, SE, M.Si, Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh

beserta seluruh staf yang bersedia memfasilitasi terlaksananya kegiatan ini.

4. Bapak Yulius Dharma, S.Ag, M.Si selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Malikussaleh beserta seluruh staf yang bersedia membantu dan memfasilitasi terlaksananya kegiatan ini.
5. Pimpinan PT. Mifa Bersaudara, Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat, dan Pimpinan PT. Superintending Company of Indonesia (Sucofindo) beserta seluruh jajaran didalamnya yang telah bersedia menjadi mitra kerjasama penelitian, serta selalu siap meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing dengan sungguh-sungguh sejak awal kegiatan hingga selesai penulisan laporan ini.
6. Seluruh rekan-rekan yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini.

Akhirnya penulis sangat mengharapkan agar laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi pedoman bagi kita semua terutama bagi civitas akademika Universitas Malikussaleh Lhokseumawe.

Lhokseumawe, 9 Agustus 2016

Peneliti

JULLIMURSYIDA, Ph.D
DR. M. SAYUTI, ST, M.S.c
MARIYUDI, SE, MM
TEUKU ZULKARNAEN, SE, MM

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Urgensi (Keutamaan) Penelitian	2
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1. Corporate Social Responsibility (CSR).....	5
2.2. Konsep Modal Sosial (<i>Social Capital</i>).....	6
2.3. Model Sinergisitas Stakeholder.....	6
2.4. Manajemen Ekoregion untuk Meningkatkan <i>Green Economy</i>	8
2.5. Kerangka Pemikiran	8
BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	13
3.1. Tujuan Khusus	13
3.2. Manfaat Penelitian.....	14
BAB 4. METODE PENELITIAN	15
4.1. Lokasi Penelitian	15
4.2. Teknik Pengumpulan Data.....	15
4.3. Metode Analisis Data	15
4.4. Garis Besar Pendekatan Penelitian.....	16
4.5. Peta Jalan Penelitian	17
BAB 5. HASIL YANG DICAPAI	19
5.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	19
5.2. Gambaran Umum Perusahaan Tambang Batu Bara.....	20
5.3. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Tambang Batu Bara.....	21

5.4. Transformasi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Tambang Batu Bara	22
5.4.1. Persepsi Responden terhadap Dampak Kehadiran Tambang Batu Bara	22
5.4.2. Transformasi Sosial Ekonomi Masyarakat	27
5.5. Jejaring dan Sistem Kolaborasi	33
5.5.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjalannya Kolaborasi Antar Stakeholder dalam Program <i>Community Development</i>	33
5.5.2. Pandangan Stakeholder Terhadap Program CD PT. Mifa Bersaudara dan Sistem Kolaborasi diantara Mereka	42
5.5.3. Jejaring dan Sinergi Program	49
5.6. Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang Batu Bara	51
5.6.1. Peran Serta Stakeholder	51
5.6.2. Proses Pembentukan, Pengembangan, dan Pengujian Model	57
5.6.3. Tahapan Utama dalam Model PISS-ME	61
5.7. Rancangan Program	68
BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA	83
6.1. Jadwal Kegiatan Penelitian	83
BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN	84
7.1. Kesimpulan	84
7.2. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan produksi pertambangan batu bara sebagai sumber energi tak terbarukan (*non renewable energy resources*) di Indonesia sampai saat ini cukup pesat. Data terakhir hingga tahun 2008 dari statistik batu bara dunia (Sumber: World Coal Statistic/IEA, 2009) menunjukkan bahwa Indonesia telah menjadi negara pengekspor batu bara nomor 2 di dunia (sebesar 203 juta ton) setelah Australia (sebesar 252 juta ton), bahkan pada tahun 2007 ekspor batu bara Indonesia pernah menduduki peringkat pertama mencapai 164,5 juta ton.

Berdasarkan data Badan Geologi tahun 2008, sumber (*resources*) batu bara di Indonesia sebanyak 104,76 miliar ton, selain dijadikan komoditas ekspor ke luar negeri juga menjadi salah satu komoditas yang diperdagangkan di dalam negeri terutama untuk sektor industri seperti: PLTU, semen, industri tekstil, industri kertas, metalurgi, briket, dan lain-lain dengan jumlah penggunaan mencapai 36 juta ton di tahun 2005 (TekMIRA, 2006; DPPMB, 2006).

Propinsi Aceh memiliki sumber energi batu bara potensial yang tersebar di beberapa daerah seperti Meulaboh, Aceh Barat, Singkil, dan Nagan Raya. Sektor pertambangan merupakan sektor terpenting di Propinsi Aceh mengingat peranan sektor tersebut dalam pembentukan PDRB yang mencapai 30,95% (BKPM Aceh, 2012). Praktek *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang selama ini dilakukan oleh perusahaan pertambangan belum menunjukkan hasil yang signifikan, khususnya bila dikaitkan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat malah memicu berbagai konflik sosial ekonomi.

Pada sisi lain keberadaan tambang batu bara juga menimbulkan permasalahan lingkungan hidup, termasuk erosi tanah, polusi debu, suara dan air, serta dampak terhadap keanekaragaman hayati setempat (World Coal Institute, 2005).

Model berbasis sinergisitas stakeholder dan manajemen ekoregion sebagai pendekatan yang *holistic* diharapkan dapat menjadi peluang pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara dan menggerakkan ekonomi rakyat, sekaligus sebagai salah satu upaya pemberantasan kemiskinan di Provinsi Aceh.

1.2. Urgensi (Keutamaan) Penelitian

Batu bara adalah suatu industri global, dimana batu bara ditambang secara komersial di lebih dari 50 negara dan batu bara digunakan di lebih dari 70 negara. Dunia saat ini mengkonsumsi batu bara sebanyak lebih dari 4050 Juta. Batu bara digunakan diberbagai sektor – termasuk pembangkit listrik, produksi besi dan baja, pabrik semen dan sebagai bahan bakar cair.

Produksi batu bara saat ini berjumlah lebih dari 4030 Juta – suatu kenaikan sebesar 38% selama 20 tahun terakhir. Pertumbuhan produksi batu bara yang tercepat terjadi di Asia, sementara produksi batu bara di Eropa menunjukkan penurunan. Negara penghasil batu bara terbesar adalah Cina, AS, India, Australia, Indonesia dan Afrika Selatan. Sebagian besar dari produksi batu bara dunia digunakan di negara tempat batu bara tersebut di produksi, hanya sekitar 18% dari produksi antrasit yang ditujukan untuk pasar batu bara internasional. Saat ini batu bara menjadi bahan bakar pembangkit listrik dunia sekitar 39%. Konsumsi batu bara ketel uap diproyeksikan untuk tumbuh sebesar 1,5% per tahun dalam jangka waktu 2002-2030. (World Coal Institute, 2005).

Meskipun isu tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility-CSR*) sudah cukup lama muncul di negara-negara maju, namun di Indonesia, isu tersebut baru akhir-akhir ini

mengalami perhatian yang cukup intens dari berbagai kalangan. Respons pemerintah terhadap pentingnya CSR ini misalnya terlihat dari dikeluarkannya Kebijakan Pemerintah melalui Kepmen. BUMN Nomor: Kep-236/MBU/2003, yang mengharuskan seluruh BUMN untuk menyisihkan sebagian labanya untuk pemberdayaan masyarakat yang dikenal dengan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL).

Gagasan Model sinergisitas stakeholders ini didasarkan pada fakta bahwa sudah cukup banyak, program/proyek yang dikurcurkan oleh pemerintah, seperti Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Canda Kulak (KCK), Supra Insus, Kredit Usaha Kecil (KIK), Kredit Canda Kulak (KCK), Pembangunan Kawasan Terpadu (PKT), Inpres Desa Tertinggal (IDT), Jaring Pengaman Sosial (JPSPDMDKE), termasuk dana CSR oleh korporat belum menunjukkan hasil optimal kalau tidak disebut gagal. Kajian terhadap program-program tersebut menunjukkan bahwa penghantaran sumberdaya finansial (modal) semata tidaklah cukup tanpa dibarengi oleh persiapan sosial yang memadai sebelum bergulirnya sumberdaya modal.

Model sinergisitas stakeholders ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada satu pihakpun yang sanggup secara sendirian menjalankan fungsi yang sangat kompleks dalam upaya pemberdayaan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Model ini juga sangat relevan dengan tuntutan global bagi perusahaan (korporasi) untuk menjalankan *Good Corporate Governance (GCG)*, dengan melibatkan berbagai stakeholder.

Bila korporat sungguh-sungguh bersedia menyisihkan sebagian keuntungannya (1-5%) saja dari labanya, maka sangat mungkin untuk menghimpun dana program CSR. Pemerintah juga memiliki kelebihan dalam penghantaran finansial dan membuat regulasi terkait dengan implementasi CSR. Sementara itu, Perguruan Tinggi/*Civil Society*/LSM memiliki kelebihan dalam melakukan

persiapan sosial. Agar kolaborasi tersebut dapat berjalan efektif dan efisien, dalam relasi antar *stakeholders* dengan masyarakat, harus didasari dengan elemen *social capital* yaitu *trust*. Dalam kondisi masyarakat yang miskin, mempersiapkan masyarakat sebelum penghantaran sumber daya modal (*finansial*) adalah bagian dari proses pemberdayaan (*empowering*). Dalam konteks seperti ini, Model sinergisitas *stakeholders* menjadi satu alternatif solusi bagi pemberdayaan masyarakat miskin di Provinsi Aceh.

Konsumsi energi dapat memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup. Menekan dampak negatif dari kegiatan manusia terhadap lingkungan hidup – termasuk penggunaan energi – merupakan prioritas global. Eksploitasi sumberdaya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan akan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan. Hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya adalah sirkuler, berarti jika terjadi perubahan pada lingkungan hidupnya dan meningkatkan risiko bencana maka manusia akan terpengaruh. Penetapan ekoregion memiliki perencanaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat menjamin perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Corporate Social Responsibility (CSR)

Masih relatif barunya konsep CSR tersebut diperbincangkan oleh berbagai kalangan, membuat pemahaman terhadap konsep CSR tersebut juga masih berbeda-beda, dan dipraktikkan secara berbeda-beda pula. Konsep CSR tidaklah sama dengan karikatif (*charity*) atau *philanthropy* (kedermawanan) yang lebih spontan pemberiannya dan kurang memiliki efek jangka panjang bagi masyarakat dalam arti pemberdayaan mereka baik secara ekonomi, sosial, dan budaya.

Menurut Widiyanarti (2005), pendekatan CSR hendaknya dilakukan secara *holistic*, artinya menuju ke arah CSR yang lebih menekankan pada keberlanjutan pengembangan masyarakat (*community development*). Intinya, bagaimana dengan CSR tersebut masyarakat menjadi berdaya baik secara ekonomi, sosial, dan budaya secara berkelanjutan (*sustainability*). Kottler dan Lee (2005), bahwa pola *Community Development* (CD) merupakan bentuk CSR yang saat ini banyak dipraktikkan oleh perusahaan (korporasi) besar. Dalam implemenetasi CD inilah potensi modal sosial (*social capital*) dapat dimanfaatkan dan didayagunakan. Riset yang dilakukan masih berkisar pada praktik CSR yang sedang berlangsung saat ini, seperti yang dilakukan Saidi (2002); Widiyanarti (2004); Nursahid (2006); Jahya (2006); dan Suprpto (2006). Temuan-temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih ada sesuatu yang harus diperbaiki dalam implementasi CSR.

2.2. Konsep Modal Sosial (*Social Capital*)

Ibrahim (2006) menyebutkan bahwa hakikat modal sosial adalah hubungan sosial yang terjalin dalam kehidupan sehari-hari warga masyarakat, pola hubungan sosial inilah yang mendasari kegiatan bersama atau kegiatan kolektif antar warga masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tersebut mampu mengatasi masalah mereka secara bersama-sama (partisipasi aktif).

Kegiatan bersama (kolektif) antar warga masyarakat dapat terbangun bila terpenuhi ketersediaan elemen-elemen modal sosial. Elemen-elemen pokok modal

sosial tersebut antara lain adalah: (1) hubungan saling percaya (*trust*); (2) jaringan sosial (*social networks*) (3) pranata (*institutions*); dan (4) resiprositas (pertukaran timbal balik). (Ostrom, 1993; Putnam, 1993; Fukuyama, 1995; Adams & Someswar, 1996; Grootaert, 1998; Pretty & Ward, 1999; Krishna & Uphoff, 1999; Lubis, 2002; Badaruddin, 2006).

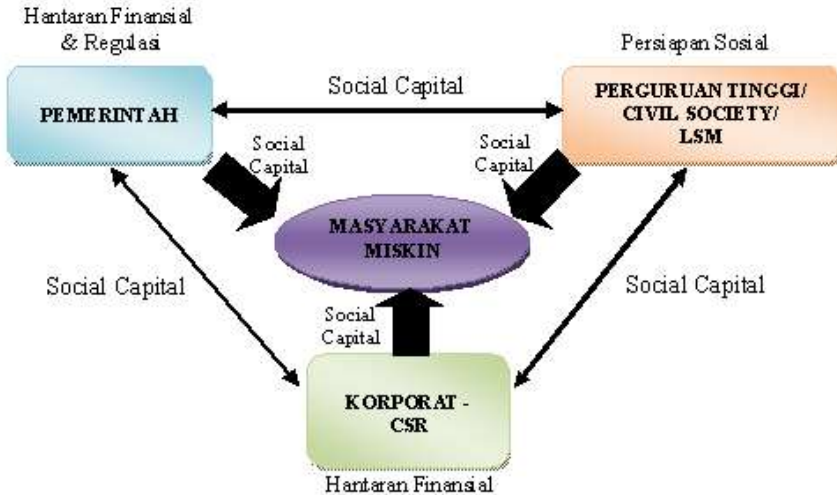
Beberapa kajian yang menggunakan konsep modal sosial (*social capital*), modal sosial merupakan salah satu prasyarat bagi keberhasilan suatu program pembangunan (Ostrom, 1993; Mackie, 1998; Rose, 1999). Putnam (1993) dan Fukuyama (1995) menyebutkan bahwa modal social tidak terletak pada individu, tetapi pada kelompok, komunitas, bahkan pada tingkat negara (*state*).

2.3. Model Sinergisitas Stakeholder

Studi yang dilakukan Badaruddin (2006) menemukan bahwa salah satu faktor penyebab sulitnya komunitas nelayan tradisional dan nelayan buruh keluar dari perangkap kemiskinan adalah rendahnya atau tidak berkembangnya modal sosial dalam komunitas tersebut. Hal tersebut juga dikuatkan oleh Ali Wafa (2003), Salman (1999) Fukuyama (1995:26), dan Lubis (2002), Ohama (2001). Beberapa kasus lain adalah pengalaman sejumlah program/proyek reduksi kemiskinan dengan pemanfaatan potensi modal sosial pada

berbagai negara Amerika Latin dan Karibia, seperti El Salvador, Jamaica, Venezuela, Columbia, Argentina, dan Bolivia (Fiszbein dan Lowden, 1999).

Sinergisitas dilakukan oleh berbagai stakeholders (Pemerintah, Perguruan Tinggi/*Civil Society*/ LSM, dan Korporat-CSR) dalam upaya pemberdayaan masyarakat, baik sosial, ekonomi, dan budaya. Korporat memiliki kelebihan dalam hal penghantaran sumberdaya finansial melalui program CSR. Pemerintah juga memiliki kelebihan dalam penghantaran finansial dan membuat regulasi yang terkait dengan implementasi CSR. Sementara itu, Perguruan Tinggi/*Civil Society*/LSM memiliki kelebihan dalam hal melakukan persiapan sosial. Agar sinergisitas tersebut dapat berjalan efektif dan efisien, dalam setiap relasi antar stakeholders dengan masyarakat dan sebaliknya, harus didasari dengan elemen-elemen *social capital* berupa saling percaya (*trust*) (Fukuyama, 1995).



Gambar 2.1: Model Sinergisitas Stakeholder untuk Pemberdayaan Masyarakat

2.4. Manajemen Ekoregion untuk Meningkatkan *Green Economy*

Menurut Siswanto (2005, 31) upaya pelestarian terhadap masalah lingkungan hidup sangat kompleks dan memerlukan perhatian yang bersifat komprehensif dan menjadi tanggungjawab pemerintah yang didukung partisipasi masyarakat. Bethan (2008, 26-27) menegaskan aspek fundamental yang melandasi prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yaitu AMDAL. Hasil tersebut juga didukung oleh Munn (dalam Soemartono, 1996), Hardjasoemantri (2009, 252), Zaidun (2008, 27).

Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mendefinisikan ekoregion sebagai wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup, sehingga memiliki maksud: Penetapan ekoregion memiliki perencanaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat menjamin perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. Sudrajat (2010, 148) mengemukakan konsep pemberdayaan masyarakat yang dituangkan kedalam UU Pertambangan, Mineral dan Batu Bara merupakan penggabungan upaya kegiatan usaha hasil sumber daya alam dengan penciptaan kesejahteraan rakyat.

2.5. Kerangka Pemikiran

Tahapan awal dalam penelitian ini adalah mengkaji peran serta pihak pemerintah, swasta, masyarakat, LSM dan perguruan tinggi dalam program *Community Development* (CD) PT. Mifa Bersaudara. Pada pihak pemerintah akan dikaji apakah mereka

telah berupaya memaksimumkan layanan, agar interaksi setiap *stakeholder* dalam program CD berjalan baik. Apakah lembaga pemerintah daerah (dinas) dapat menjalankan peran sebagai pembimbing, fasilitator, dan penyuluh teknis sehingga memperoleh kelembagaan lokal yang kokoh yang tumbuh secara alamiah dalam proses pembelajaran.

Pada pihak swasta dikaji apakah mereka menyadari tanggungjawab sosial itu merupakan suatu insentif ataukah beban. Akan dipelajari kinerja manajerial swasta, tindakannya terhadap kelestarian lingkungan, dan sikapnya terhadap masyarakat lokal (pengakomodasian terhadap hak tradisional, penggalangan partisipasi masyarakat, dan kemanfaatan perusahaan terhadap masyarakat lokal).

Di pihak masyarakat akan dikaji peranserta mereka dalam program CD PT. Mifa Bersaudara, apakah peranserta masyarakat sudah diikuti dengan kemampuan untuk itu. Bagaimanakah iklim sudah menunjang ke arah tersebut, dapatkah masyarakat merasakan peran pemerintah dalam mendukung dan memfasilitasi program-program partisipatif agar program-program tersebut berkembang dan berkelanjutan.

Di pihak perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) akan dikaji kepedulian kedua lembaga tersebut terhadap masalah pemberdayaan masyarakat. Fungsi obyektif lembaga ini adalah memaksimumkan layanan akomodatif, korektif, dan suportif agar interaksi *stakeholder* berjalan baik.

Langkah kedua dalam penelitian ini adalah menentukan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap terjalannya *networking* antara *stakeholder* mempengaruhi keberhasilan program CD. Sehingga dapat memberikan masukan dalam menentukan strategi pembangunan *networking* dalam program CD. Adapun faktor-faktor yang dikaji tersebut antara lain faktor hukum, politik, kelembagaan, ekonomi dan sosial-budaya.

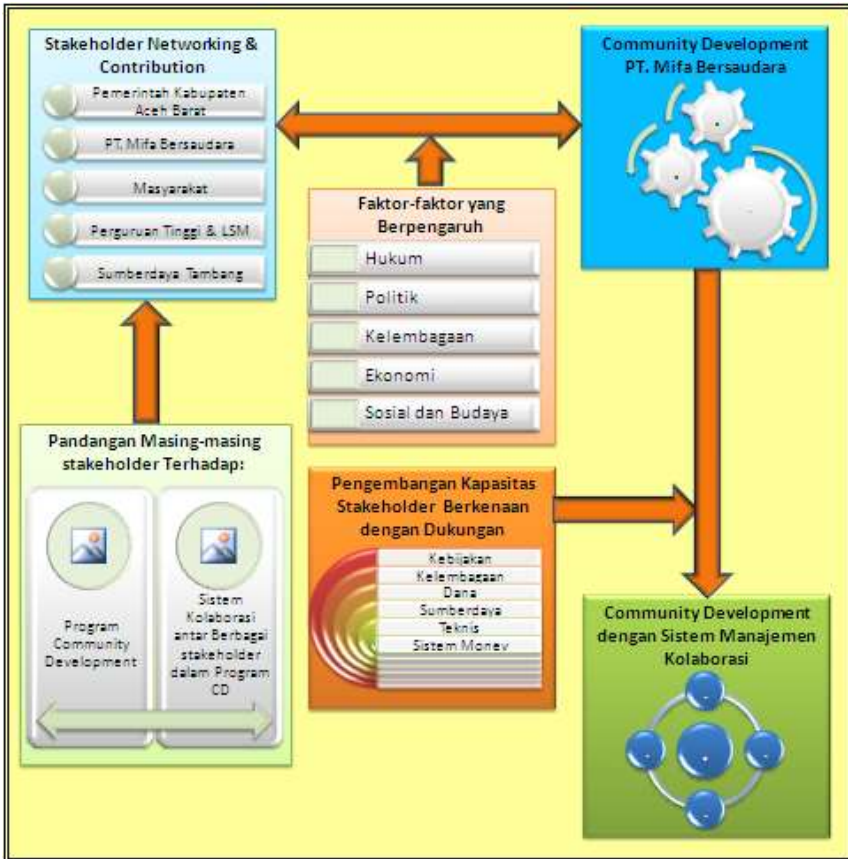
Dalam tahap pengembangan kapasitas *stakeholder* adalah bagaimana rnengembangkan kapasitas masing-masing *stakeholder* berkenaan dengan dukungan kebijakan, kelembagaan, dana, sumberdaya, teknis, sistem monitoring dan evaluasi, Masing-masing *stakeholder* dilihat potensi dan permasalahannya untuk berkolaborasi secara efektif dan efisien.

Program CD sebagai program bersama akan dikaji apakah masing-masing *stakeholder* mempunyai tata nilai atau kebiasaan yang mendukung tindakan kooperasi. Sehingga akan dikaji juga apakah pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal siap untuk berdialog dan berkolaborasi.

Langkah ketiga dari penelitian ini adalah mengetahui pandangan dari masing-masing *stakeholder* terhadap program CD. Pemahaman *stakeholder* terhadap program CD akan mempengaruhi apresiasi dan keterlibatan mereka dalam program. Pandangan yang keliru mengenai peranan *stakeholder* dalam program CD dapat menyebabkan tidak jelasnya tanggungjawab dari masing-masing yang terlibat. Kesamaan pandangan dan kepentingan semua pihak terkait merupakan dasar kolaborasi *stakeholder* dalam program CD. Kerangka pemikiran dalam menerapkan manajemen kolaborasi dalam program CD PT. Mifa Bersaudara ditunjukkan pada Gambar 2.2.

Mengintroduksi kelembagaan yang sama sekali baru kepada masyarakat akan sulit dilakukan. Karena itu, akan penting untuk dikaji proses pemaduan antara kelembagaan pemerintah dengan kelembagaan lokal. Dalam kaitannya dengan pemanduan kelembagaan, akan perlu dikaji apakah inisiatif proses itu datang dari pemerintah atau yang lainnya. Atau hanya menjejalkan konsep kelembagaan pemerintah, namun untuk mengadaptasikan kelembagaan pemerintah pada kelembagaan lokal tidak ada. Masyarakat akan termotivasi, apakah karena imbalan material,

ataukah karena terciptanya "rasa memiliki" untuk melakukan pemberdayaan dan melembagakan kekuatan masyarakat.



Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran Penelitian

BAB 3

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Khusus

1. Kajian ini difokuskan pada pembentukan model pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara berbasis sinergisitas *stakeholders* (Pemerintah, Perguruan Tinggi/*Civil Society*/LSM, dan Korporat-CSR) sebagai satu alternatif solusi dalam menggerakkan ekonomi rakyat, pemberantasan kemiskinan, dan sebagai suatu momentum untuk merajut kembali rasa saling percaya (*trust*) dengan memanfaatkan potensi modal sosial yang ada dalam komunitas masyarakat miskin di Provinsi Aceh.
2. Pembentukan strategi pengelolaan lingkungan hidup dengan pendekatan manajemen ekoregion yang merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup menjadi suatu industri tambang batu bara tanpa merusak lingkungan (*Green Economic*).
3. Merumuskan aplikasi model pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batubara berbasis sinergisitas stakeholder dan manajemen ekoregion untuk menggerakkan ekonomi rakyat di Provinsi Aceh, serta merumuskan rekomendasi langkah dan kebijakan yang perlu ditempuh serta memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan, mengurangi potensi konflik sosial ekonomi, dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya:

1. Terbentuknya model pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara berbasis sinergisitas *stakeholders* (Pemerintah, Perguruan Tinggi/*Civil Society*/LSM, dan Korporat-CSR) sebagai satu alternatif solusi dalam menggerakkan ekonomi rakyat, pemberantasan kemiskinan, dan sebagai suatu momentum untuk merajut kembali rasa saling percaya (*trust*) dengan memanfaatkan potensi modal sosial yang ada dalam komunitas masyarakat miskin di Provinsi Aceh.
2. Terbentuknya strategi pengelolaan lingkungan hidup dengan pendekatan manajemen ekoregion yang merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup menjadi suatu industri tambang batu bara tanpa merusak lingkungan (*Green Economic*).
3. Dirumuskannya aplikasi model pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batubara berbasis sinergisitas stakeholder dan manajemen ekoregion untuk menggerakkan ekonomi rakyat di Provinsi Aceh, guna mendorong pertumbuhan berkelanjutan dengan mengintegrasikan seluruh elemen yang ada serta melibatkan pilar pelaku pemerintah daerah, pelaku bisnis, dan akademisi.

BAB 4

METODE PENELITIAN

4.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Aceh dengan wilayah kajian meliputi Aceh Barat, Singkil, dan Nagan Raya dengan penentuan lokasi *sample* dilakukan secara *purposive* berdasarkan pertimbangan bahwa daerah ini mempunyai potensi sub sektor pertambangan batu bara yang dapat menggerakkan ekonomi lokal.

4.2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode survey, data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan pendekatan partisipatif. Penentuan responden untuk wawancara ditentukan secara sengaja (*purposive sampling*) sebanyak 250 orang untuk setiap stakeholder yang relevan dan masing-masing dianggap mewakili pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah, yang terdiri dari kelompok Pemerintahan Daerah yaitu DPRD, Bappeda, Dinas Pertambangan, Disperindagkop, dan Camat; kelompok Pelaku Usaha yaitu Kadinda, Pemilik usaha, Pekerja, dan Perbankan; kelompok Masyarakat Lokal yaitu LSM, Organisasi Keagamaan dan Tokoh Masyarakat serta Media Massa.

4.3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Analisis Statistik Deskriptif.** Data diolah dan disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi, tabulasi silang.
- b. Metode Rapid Assessment for Local Economic Development (RALED).** Digunakan untuk memetakan status ekonomi rakyat

dan mengidentifikasi faktor penguangkit ekonomi rakyat atau Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL).

- c. **Metode Analytical Hierarchy Process (AHP).** Digunakan untuk Program Penentuan Bobot untuk Aspek PEL.
- d. **Analisis Sensivittas Atribut.** untuk mengetahui atribut-atribut mana yang berperan memberikan kontribusi terhadap nilai keberkelanjutan sumberdaya.
- e. **Metode Participatory Rural Appraisal (PRA).** Untuk mengkaji karakteristik permasalahan dan potensi yang ada pada masing-masing stakeholder dalam program CSR.

4.4. Garis Besar Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dibagi kedalam dua tahapan atau dua tahun pelaksanaan:

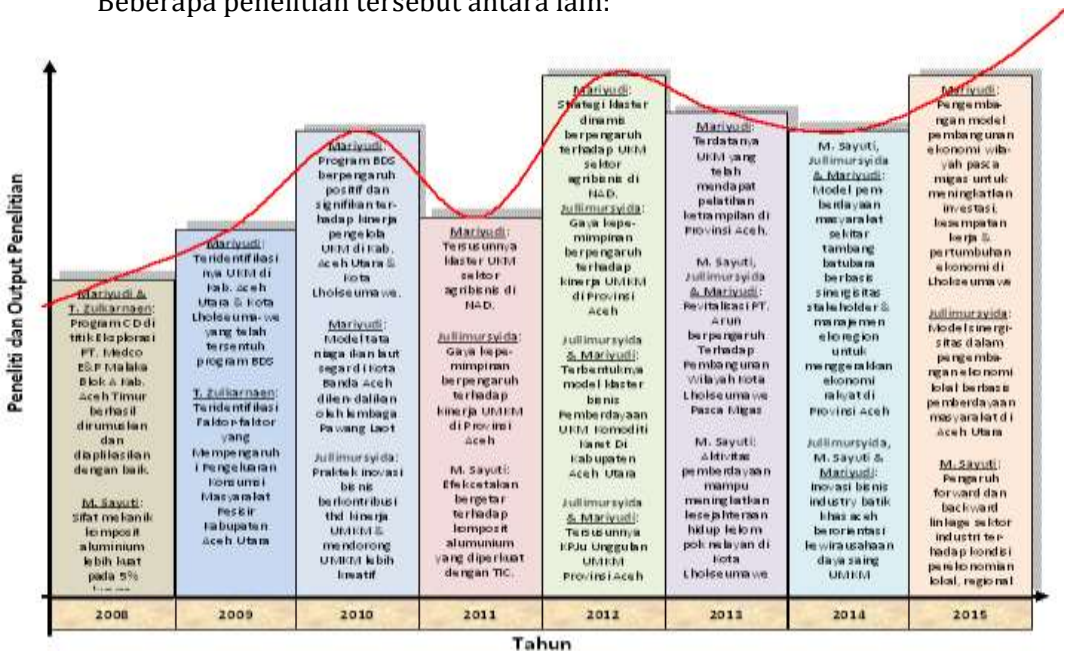
- Tahun Pertama, untuk mengkaji 2 tujuan penelitian pertama, yaitu:
 - Metode survei dalam kerangka pembentukan model pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batubara di Provinsi Aceh. Instrumen yang digunakan adalah kajian literatur, analisis data skunder, dan FGD. Pengolahan dan analisis data menggunakan analisis deskriptif.
 - Indikator capaian yang diharapkan adalah berupa naskah akademik untuk regulasi dan kebijakan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Aceh serta publikasi pada seminar dan jurnal nasional maupun internasional.
- Tahun kedua, untuk mengkaji 1 tujuan penelitian terakhir, yaitu:
 - Metode survey dalam kerangka merumuskan aplikasi model pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batubara berbasis sinergisitas stakeholder dan manajemen ekoregion untuk menggerakkan ekonomi rakyat di Provinsi Aceh. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner, FGD & *indepth*

interview. Pengolahan dan analisis data menggunakan *Participatory Rural Appraisal (PRA)*.

- Indikator capaian yang diharapkan adalah tersedianya rumusan aplikasi model pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batubara berbasis sinergisitas stakeholder dan manajemen ekoregion untuk menggerakkan ekonomi rakyat di Provinsi Aceh yang dipublikasi pada seminar dan jurnal internasional. Selengkapny bagan penelitian dapat dilihat pada lampiran.

4.5. Peta Jalan Penelitian

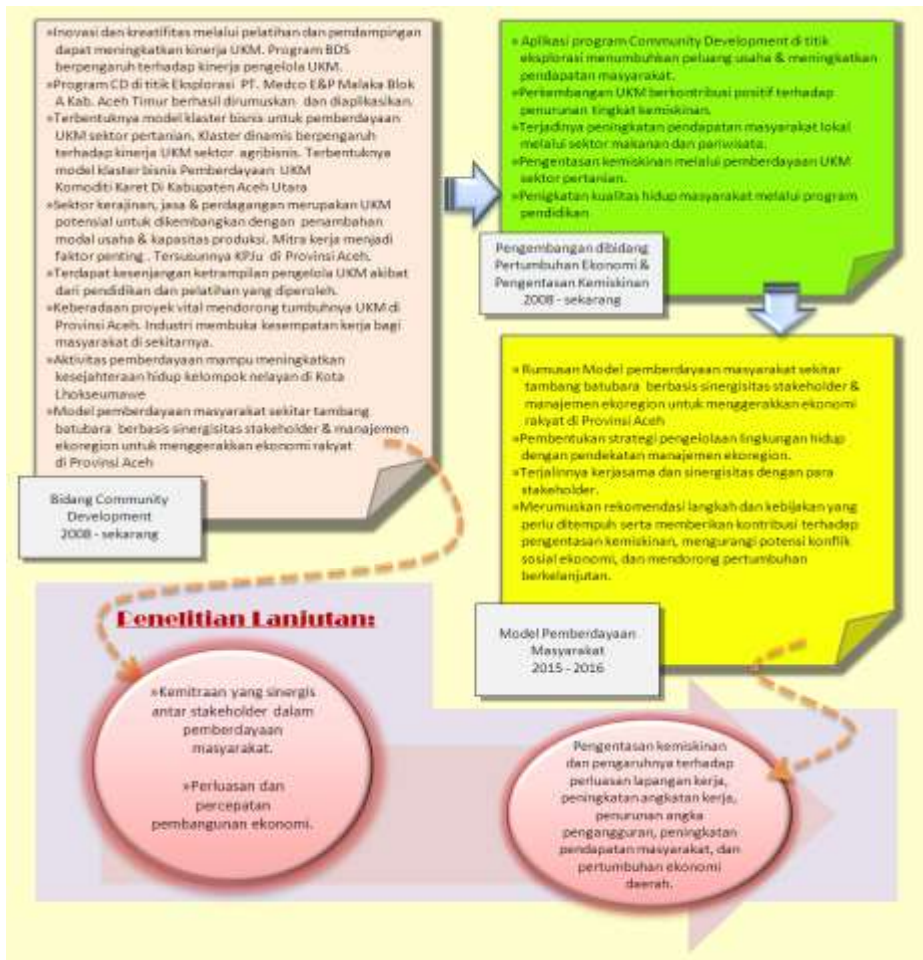
Penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat untuk menggerakkan ekonomi rakyat telah banyak dilakukan peneliti. Beberapa penelitian tersebut antara lain:



Gambar 4.1. Penelitian yang Dilakukan oleh Para Peneliti

Berdasarkan penelitian payung yang telah dilakukan oleh para peneliti dan target penelitian lanjutan yang akan dilakukan,

maka disusunlah peta jalan penelitian ini sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 4.2. Peta Jalan Penelitian

BAB 5

HASIL YANG DICAPAI

5.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Aceh Barat dengan ibukotanya Meulaboh secara geografis wilayahnya terletak pada 04°06' 04"-47' Lintang Utara dan 95°52' - 96°30' Bujur Timur, Batas batas wilayah Kabupaten Aceh Barat adalah: Sebalah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya dan Pidie, Sebalah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Nagan Raya, Sebalah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Nagan Raya serta Sebalah Barat berbatasan dengan samudera Indonesia.

Luas Wilayah Kabupaten Aceh Barat adalah 2.927,5 km² dan secara administratif wilayah Kabupaten Aceh Barat terbagi 12 Kecamatan, 33 Kemukiman dan 322 Desa/Gempong. Nama nama kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat adalah Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Kaway XVI, Kecamatan Sungai Mas, Kecamatan Woyla, Kecamatan Samatiga, Kecamatan Bubon, Kecamatan Arongan Lambalek, Kecamatan Pante Ceureumen, Kecamatan Meurabo, Kecamatan Woyla Barat, Kecamatan Woyla Timur, Dan Panton Reu. Kecamatan yang terluas wilayahnya yaitu Kecamatan Sungai Mas dengan luas 781,73 Km² atau 26,07% dan Kecamatan Terkecil wilayahnya yaitu Kecamatan Johan Pahlawan dengan Luas 44,91 Km² atau 2,00%.

Perkembangan jumlah Penduduk kondisi tahun 2013 berjumlah 377.008 jiwa terdiri dari laki-laki 160.039 jiwa, perempuan 186.969 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 0,29%, dan kepadatan penduduk 37 jiwa/Km², dengan jumlah rumah tangga 85.308 buah dan rasio jenis kelamin 101,6. Jika dilihat

jumlah penduduk menurut kelompok umur 0-6 tahun berjumlah 65.437 jiwa, 7-12 tahun berjumlah 59.740 jiwa, 13-15 tahun berjumlah 26.023 jiwa, lebih dari 16 tahun berjumlah 225.808 jiwa.

Kondisi Iklim di Kabupaten Aceh Barat termasuk dalam kategori daerah sub-tropis yang terdiri dari 2 musim iklim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan yang disertai gelombang laut biasanya terjadi pada bulan Septembur bulan Februari setiap tahunnya. Sedangkan musim kemarau berlangsung antara bulan Maret Agustus dengan suhu udara rata rata berkisar antara 26 31,2oC pada siang hari dan 23 25oC pada malam hari.

5.2. Gambaran Umum Perusahaan Tambang Batu Bara

PT Reswara Minergi Hartama (Reswara) didirikan pada tahun 2010 untuk menjadi perusahaan sub-holding bisnis pertambangan batubara terintegrasi. Sejak pendiriannya, Reswara segera melakukan berbagai langkah penting untuk memperkuat portofolio bisnis di bidang pertambangan batubara. Beberapa di antaranya adalah dengan mengakuisisi PT Tunas Inti Abadi (TIA) dan PT Media Djaya Bersama (MDB). TIA merupakan perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan-Operasi Produksi (IUP-OP) batubara di Provinsi Kalimantan Selatan. Pada Juni 2011, Reswara mengakuisisi 70% saham di PT MDB, yang memegang hak penambangan eksklusif lebih dari total 4.629 hektar areal konsesi di provinsi Aceh melalui 2 anak perusahaan yaitu PT Bara Energi Lestari ("BEL") di Nagan Raya dan PT Mifa Bersaudara ("MIFA") di Aceh Barat. Berdasarkan laporan eksplorasi 30 Juni 2011, dari total luas area penambangan MDB, diperkirakan memiliki 169 juta ton cadangan batubara dan 455 juta ton sumber daya batubara dan akan berproduksi sejak tahun 2012 dan berakhir pada tahun 2031. Cadangan batubara untuk MDB pada Juli 2011, wilayah usaha MIFA dan BEL diperkirakan memiliki 169 juta ton cadangan batubara dan 455 juta ton sumber daya batubara. Saat ini, MDB sedang dalam

tahap pembangunan infrastruktur untuk logistik batubara termasuk jalan baru yang sudah mencapai 80% penyelesaian. Direncanakan produksi komersial akan dimulai pada kuartal kedua tahun 2014.

5.3. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Tambang Batu Bara

Meulaboh adalah ibukota Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Indonesia. Kota ini terletak sekitar 175 km tenggara kota Banda Aceh di Pulau Sumatera. Meulaboh adalah kota kelahiran Pahlawan Nasional Teuku Umar Johan Pahlawan. Meulaboh merupakan kota terbesar di pesisir barat-selatan Aceh dan salah satu area yang paling parah terdampak bencana tsunami yang disebabkan oleh Gempa bumi Samudra Hindia 2004. Pekerjaan sebagian besar penduduk Meulaboh mencerminkan kehidupan perkotaan, yakni perdagangan dan jasa.

Komoditi unggulan Kabupaten Aceh Barat yaitu sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan jasa. Sektor pertanian komoditi unggulannya adalah jagung, kedelai, ubi jalar, dan ubi kayu, sub sektor tanaman perkebunan dengan komoditi Kelapa sawit, kakao, karet, tebu, kopi, kelapa, kapuk, lada, Nilam, pala dan pinang, sub sektor perikanan komoditinya adalah perikanan tangkap, budidaya jaring apung, budidaya keramba, budidaya kolam, budidaya tambak, sub sektor peternakan komoditi yang diunggulkan berupa komoditi sapi, domba, kambing, kerbau, dan kuda, sub sektor jasa yaitu wisata alam, wisata Budaya. Selain komoditi unggulan tersebut, Aceh Barat juga memiliki 5 Tempat Wisata Terindah; Pantai Lhok Bubon, Pantai Suak Ribee, Mesjid Agung Kota melaboh, 4. Pantai Cemara, Pantai batee Puteh.

5.4. Transformasi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Tambang Batu Bara

Perkembangan industri disuatu wilayah biasanya melibatkan perubahan sosial yang cepat, dengan komunitas pertanian yang berubah menjadi suatu kota atau kehidupan industri dalam waktu singkat (Webster, 2002). Sementara itu, perubahan pada suatu wilayah tidak hanya karena faktor fisik (mobilitas, jalan dan sebagainya), tetapi juga terkait degan aspek sosial ekonominya.

5.4.1. Persepsi Responden terhadap Dampak Kehadiran Tambang Batu Bara

a. Pola Perkembangan Penduduk

Adapun semenjak adanya indsutri batubara membawa dampak pola perkembangan penduduk di Kabupaten Aceh Barat, berdasarkan hasil penelitian dari 250 responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini menunjukan terdapat 173 orang atau sebesar 69,20% yang memberikan pendapat sangat berdampak, 70 orang atau sebesar 28% memberikan pendapat kurang berdampak dan 7 orang atau sebesar 2,80% memberikan pendapat tidak berdampak.



Gambar 5.1. Persepsi Responden terhadap Pola Perkembangan Penduduk

b. Pola Perpindahan Penduduk

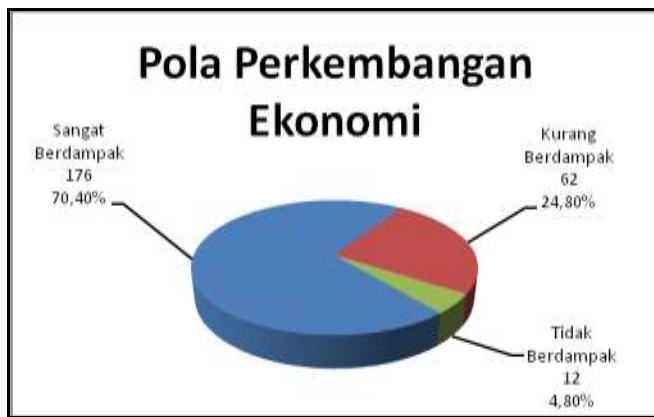
Berikut ini menyajikan data berdasarkan tanggapan responden mengenai dampak industri batubara terhadap perpindahan penduduk dari luar wilayah Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan hasil penelitian dari 250 responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini menunjukkan terdapat 204 orang atau sebesar 81,60% yang memberikan pendapat sangat berdampak, 43 orang atau sebesar 17,20% memberikan pendapat kurang berdampak dan 3 orang atau sebesar 1,20% memberikan pendapat tidak berdampak.



Gambar 5.2. Persepsi Responden terhadap Pola Perpindahan Penduduk

c. Pola Perkembangan Ekonomi

Berikut ini menyajikan data berdasarkan tanggapan responden mengenai dampak industri batubara terhadap perkembangan ekonomi di Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan hasil penelitian dari 250 responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini menunjukkan terdapat 176 orang atau sebesar 70,40% yang memberikan pendapat sangat berdampak, 62 orang atau sebesar 24,80% memberikan pendapat kurang berdampak dan 12 orang atau sebesar 4,80% memberikan pendapat tidak berdampak.



Gambar 5.3. Persepsi Responden terhadap Pola Perkembangan Ekonomi

d. Penyerapan Tenaga Kerja

Adanya industri batubara maka terbukanya peluang penyerapan tenaga kerja karena perusahaan banyak menarik masyarakat setempat untuk ikut andil dalam memperoleh lapangan pekerjaan baru.



Gambar 5.4. Persepsi Responden terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Sedangkan berdasarkan tanggapan responden dari masyarakat setempat, yaitu: berdasarkan hasil penelitian dari 250 responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini menunjukkan terdapat 237 orang atau sebesar 94,80% yang memberikan pendapat sangat berdampak, dan hanya 13 orang atau sebesar 5,20% yang memberikan pendapat kurang berdampak.

e. Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Berikut menyajikan data berdasarkan tanggapan responden mengenai dampak industri batubara terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di desa Jembayan. Berdasarkan hasil penelitian dari 250 responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini menunjukkan terdapat 193 orang atau sebanyak 77,20% yang memberikan pendapat sangat berdampak, 48 orang atau sebesar 9,60% yang memberikan pendapat kurang berdampak dan 9 orang atau sebesar 1,80% memberikan pendapat tidak berdampak.



Gambar 5.5. Persepsi Responden terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat

f. Perubahan Lapangan Kerja

Berikut ini menyajikan data berdasarkan tanggapan responden mengenai dampak industri batubara terhadap perubahan lapangan kerja di desa Jembayan. Berdasarkan hasil penelitian dari

250 responden yang disajikan sampel dalam penelitian ini menunjukan terdapat 155 orang atau sebesar 62,00% yang memberikan pendapat kurang berdampak, 65 orang atau sebesar 26,00% yang memberikan pendapat tidak berdampak, dan 30 orang atau sebesar 12,00% memberikan pendapat sangat berdampak.



Gambar 5.6. Persepsi Responden terhadap Perubahan Lapangan Kerja

Selengkapnya rangkuman persepsi responden terhadap keberadaan tambang batu bara PT. Mifa Bersaudara di Kabupaten Meulaboh:

Tabel 5.1. Rangkuman Persepsi Responden terhadap Keberadaan Perusahaan Batu Bara

No	Keterangan	Dampak		
		Sangat Berdampak	Kurang Berdampak	Tidak Berdampak
	Pola Perkembangan			
1	Penduduk	69,20%	28,00%	2,80%
2	Pola Perpindahan Penduduk	81,60%	17,20%	1,20%

	Pola	Perkembangan			
3	Ekonomi		70,40%	24,80%	4,80%
4	Penyerapan Tenaga Kerja		94,80%	5,20%	0,00%
	Peningkatan	Pendapatan			
5	Masyarakat		77,20%	19,20%	3,60%
6	Perubahan Lapangan Kerja		12,00%	62,00%	26,00%
Rata-rata			67,53%	26,07%	6,40%

5.4.2. Transformasi Sosial Ekonomi Masyarakat

a. Migrasi Masyarakat Sekitar Pengembangan PT. Mifa Bersaudara

Migrasi merupakan salah satu faktor penting dalam suatu perubahan sosial, sekaligus juga sebagai salah satu komponen yang mempengaruhi proses transformasi (Bryant dkk, 1982; Russwurm, 1977; Iaquina & Drescher, 2000). Hasil survey dalam studi ini menunjukkan bahwa wilayah studi secara signifikan diwarnai oleh adanya migrasi yang masuk ke desa-desa di sekitar pengembangan lahan skala besar PT. Mifa Bersaudara, yang merupakan bagian dari wilayah studi. Melalui hasil survey diketahui bahwa 42,75% dari responden merupakan penduduk pendatang, dan sisanya merupakan penduduk asli yang sejak lahir telah tinggal di wilayah studi. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah sekitar pengembangan lahan PT. Mifa Bersaudara kini tidak hanya dikuasai oleh penduduk asli saja, tetapi oleh migran yang masuk dan memilih tinggal di wilayah tersebut. Gambaran mengenai komposisi pendatang dan penduduk asli tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan Bowder dan Bohland (1990) di dalam artikelnya, bahwa sebagian besar penduduk di daerah pinggiran merupakan pendatang yang berasal dari pedesaan maupun perkotaan.

Mengingat pembangunan kawasan PT. Mifa Bersaudara juga baru dimulai, maka peningkatan arus pendatang di sini tampaknya juga tidak terlepas dari keberadaan pengembangan PT. Mifa

Bersaudara. PT. Mifa Bersaudara dengan berbagai pembangunan di dalamnya ikut mempengaruhi perkembangan daerah di sekitarnya, dan menarik para pendatang untuk tinggal di wilayah ini.

Berdasarkan penelusuran mengenai migrasi yang telah dijelaskan sebelumnya, peningkatan penduduk di sini tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan alami atau kelahiran saja, tetapi juga karena adanya migrasi yang masuk ke sekitar pengembangan PT. Mifa Bersaudara.

Proses masuknya para pendatang menuju wilayah sekitar PT. Mifa Bersaudara menurut hasil survey primer, sebagian besar (78,20%) hanya dilakukan dalam satu kali perpindahan, atau dengan kata lain pendatang dari tempat asalnya langsung pindah menuju wilayah studi tanpa pernah pindah ke tempat lain sebelumnya.

b. Transformasi Mata Pencaharian Masyarakat Sekitar Tambang Batu Bara

Bryant dkk (1982) menyatakan adanya pergeseran struktur tenaga kerja di sektor primer pada area peri-urban sebagaimana juga area proyek pembangunan. Sementara Webster (2002) melihat perkembangan biasanya melibatkan perubahan sosial yang cepat, ketika komunitas pertanian berubah menjadi suatu kota atau kehidupan industri dalam waktu yang singkat. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh laquinta dan Drescher (2000) mengenai perubahan sosial yang dinamis pada wilayah industri.

Dalam menganalisis transformasi komponen ekonomi ini, mata pencaharian masyarakat dapat dikelompokkan dalam tiga sektor, yaitu sektor primer, sekunder dan tersier. Hasil studi menunjukkan bahwa terjadi penurunan prosentase mata pencaharian utama rumah tangga responden di sektor primer dalam kurun waktu pengembangan industri PT. Mifa Bersaudara. Di sisi lain terjadi peningkatan prosentase mata pencaharian utama rumah tangga responden di sektor lain, khususnya pada sektor tersier. Jika

membandingkan dari ketiga sektor tersebut, maka sektor tersier tampak mendominasi mata pencaharian utarna responden rumah tangga sekitar pengembangan perusahaan batu bara PT. Mifa Bersaudara.

Jika ditelusuri lebih jauh, dominasi sektor tersier tersebut - sekaligus juga ditinggalkannya sektor primer (pertanian dan perkebunan), tidak hanya terjadi pada responden pendatang saja, tetapi juga pada responden yang merupakan penduduk asli. Sehingga dalam hal ini gejala masyarakat yang terindustrialisasi seperti yang ungkapkan Bryant dkk (1982), tidak hanya ditunjukkan oleh peningkatan jumlah pendatang yang masuk dan kemudian bekerja pada unit-unit kegiatan industri maupun komersial PT. Mifa Bersaudara dari sekitarnya, tetapi juga terjadi pada penduduk asli yang meninggalkan kegiatan pertanian - yang dulunya merupakan sektor dominan dalam perekonomian masyarakat, menuju kegiatan yang lebih bersifat jasa.

Dalam hal ini dapat dilihat juga bahwa sektor jasa (tersier), yang meliputi mata pencaharian sebagai buruh, karyawan, PNS, pensiunan, menyewakan rumah dan guru, mendominasi mata pencaharian responden rumah tangga masyarakat sekitar pengembangan perusahaan batu bara PT. Mifa Bersaudara. Peningkatan tersebut merupakan salah satu hal yang menunjukkan bahwa rnasyarakat di wilayah studi telah terurbanisasi dan terindnstrialisasi, seperti yang digambarkan Bryant dkk (1982) . Industri PT. Mifa Bersaudara memberikan banyak peluang pekerjaan bagi masyarakat, tidak hanya untuk masyarakat yang tinggal di wilayah kajian tetapi juga masyarakat sekitrnya. Adanya peluang mata pencaharian di wilayah industri ini sejalan dengan apa yang disampaikan Tacoli (1999), Briggs dan Mwamfupe (200 I), Brook (2000) serta Bryant dkk (1982).

Ada berbagai jenis pekerjaan yang masuk dalam kategori buruh. Diantaranya adalah buruh industri atau buruh pabrik, supir, buruh bangunan atau tukang bangunan, tukang ojek, tukang cuci, dan lain sebagainya.

Di sisi lain sektor sekunder, yang dalam hal ini meliputi mata pencaharian pedagang dan wiraswasta, juga cenderung mengalami peningkatan, walaupun tidak sebesar peningkatan yang dialami mata pencaharian buruh dan karyawan. Berdasarkan hasil survey primer, mata pencaharian pedagang di sini diantaranya adalah pedagang sembako, pedagang warung makanan, dan sebagainya. Sedangkan untuk mata pencaharian wiraswasta - berdasarkan hasil survei diantaranya adalah pengusaha furniture, kusen pintu dan jendela, pemilik wamet, bengkel, fotocopy dan sebagainya.

Di sini terdapat suatu indikasi bahwa semakin lama responden pendatang semakin peka dalam menangkap berbagai peluang maupun kesempatan untuk mengembangkan mata pencaharian rumah tangganya.

c. Transformasi Pendapatan dan Pengeluaran Masyarakat Sekitar Tambang Batu Bara

Pendapatan rumah tangga responden masyarakat sekitar pengembangan perusahaan batu bara PT. Mifa Bersaudara cenderung mengalami peningkatan. Hal ini diantaranya dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean) dan nilai tengah (median) total pendapatan responden yang terus meningkat. Walaupun demikian, peningkatan tersebut masih belum cukup untuk dijadikan sebagai indikasi bahwa kondisi perekonomian masyarakat sekitar pengembangan perusahaan batu bara PT. Mifa Bersaudara semakin membaik.

Adapun peningkatan di sini selain karena inflasi yang terjadi dalam kurun waktu tersebut, juga karena semakin membaiknya kondisi perekonomian rumah tangga masyarakat itu sendiri. Hal ini

diketahui melalui pengamatan terhadap pertumbuhan prosentase beberapa kelas pendapatan per tahun yang nilainya lebih besar daripada pertumbuhan rata-rata inflasi per tahun yang terjadi dalam masing-masing kurun waktu tersebut. Kondisi seperti ini hampir sama dengan apa yang menjadi hasil analisis Bauer dan Roux (1976) serta Bryant dkk (1982), bahwa masyarakat yang tinggal di area industri memiliki kondisi sosial ekonomi yang relatif baik.

Adapun untuk pengeluarannya, tidak jauh berbeda dengan gambaran pendapatan rumah tangga responden yang telah dijelaskan sebelumnya. Sehingga dalam hal ini sebagian besar rumah tangga responden memiliki pengeluaran rumah tangga yang berimbang dengan besarnya pendapatan. Meskipun demikian, masih ada pula sebagian kecil rumah tangga responden yang pengeluarannya lebih besar daripada pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian kecil rumah tangga di wilayah studi masih kurang mampu mencukupi berbagai keperluan rumah tangganya dengan pendapatan yang diperoleh setiap bulannya.

Berikutnya, jika dilihat nilai rata-ratanya, secara keseluruhan biaya-biaya yang dikeluarkan rumah tangga responden untuk berbagai keperluan cenderung terus meningkat. Biaya paling tinggi yang harus dikeluarkan rumah tangga responden setiap bulannya adalah biaya makan, diikuti dengan biaya-biaya lainnya seperti biaya untuk tabungan, transportasi, biaya rutin tempat tinggal, biaya pendidikan, biaya listrik, air dan telepon, serta biaya kesehatan.

Selanjutnya diperjelas melalui tabel berdasarkan penghitungan nilai dari pengaruh dampak industri batubara terhadap sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Aceh Barat. berikut tabel dibawah ini :

Tabel 5.2. Hasil Perhitungan Nilai Pengaruh Dampak Keberadaan Perusahaan Batu Bara

No.	Keterangan	Nilai
1	Pola Perkembangan Penduduk	254 orang /km ²
2	Pola Perpindahan Penduduk	2,43%
3	Pola Perkembangan Ekonomi	7,40%
4	Penyerapan Tenaga Kerja	53,4%
5	Berkembangnya struktur ekonomi	7,42%
6	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	2.500.000
7	Perubahan Lapangan Kerja	7.400.000

Berdasarkan tabel 5.1 dan tabel 5.2, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pola perkembangan penduduk berdasarkan tanggapan responden dinyatakan sangat berdampak dengan hasil tanggapan responden sebesar 69,20 % dan diperkuat dengan hasil penghitungan terhadap kepadatan penduduk yang bertambah 254 orang /km².
2. Pola perpindahan penduduk berdasarkan tanggapan responden dinyatakan sangat berdampak dengan hasil tanggapan responden sebesar 81,60% dan diperkuat dengan hasil penghitungan nilai pengaruh dampak industri pada pola perpindahan penduduk sebesar 2,43%.
3. Pola perkembangan ekonomi berdasarkan tanggapan responden dinyatakan sangat berdampak dengan hasil tanggapan responden sebesar 70,40 % dan diperkuat dengan hasil penghitungan rasio beban tanggungan berjumlah 7,40%.
4. Penyerapan tenaga kerja berdasarkan tanggapan responden dinyatakan sangat berdampak dengan hasil tanggapan responden sebesar 94,80 % dan diperkuat dengan hasil

penghitungan nilai pada tingkat partisipasi kerja yang mencapai 53,4% tenaga kerja yang diambil dari penduduk setempat.

5. Peningkatan pendapatan masyarakat dinyatakan berdampak dengan hasil responden sebesar 77,20 % dan diperkuat dengan hasil penghitungan nilai pada pendapatan masyarakat sebesar Rp 2.500.000.
6. Perubahan lapangan kerja dinyatakan kurang berdampak dengan hasil tanggapan responden sebesar 62,00% dan diperkuat dengan hasil penghitungan nilai pada pendapatan perkapita Rp 7.400.000/ tahun.

5.5. Jejaring dan Sistem Kolaborasi

5.5.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjalinnnya Kolaborasi Antar Stakeholder dalam Program *Community Development*

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjalinnnya kolaborasi antar stakeholder dalam program *Community Development* adalah:

a. Faktor Hukum

Peraturan daerah (Qanun) yang spesifik mengenai program *Community Development* (CD) di Kabupaten Aceh Barat masih dalam tahap perumusan dan pembahasan. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, mulai membentuk dan melakukan uji publik terhadap rancangan qanun (raqan) tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP) atau disebut qanun Corporate Social Responsibility (CSR) untuk sektor pertambangan dan perkebunan di wilayah itu. Uji publik tersebut dilaksanakan di Bappeda Aceh Barat dengan melibatkan unsur pemerintah, perusahaan dan masyarakat.

Pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat (PPM) merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mencapai visi dan misi perusahaan dengan tetap berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) juga diatur dalam berbagai peraturan dan

perundangan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar kawasan operasional perusahaan. Peraturan dan perundangan yang mengatur antara lain:

- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. (Pasal 108)
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108)
- Undang-undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 Bagian Ketiga tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam (Pasal 158, Pasal 159)
- Qanun Provinsi Aceh Nomor 12 tahun 2002 tentang Pertambangan Umum, Minyak Bumi dan Gas Alam. BAB XIV tentang Kewirausahaan dan Pengembangan MAsyarakat (Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30)

Dengan dasar inilah sudah menjadi keharusan bagi PT. Mifa Bersaudara yang memanfaatkan dan mengelola tambang batu bara untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat sekitar operasinya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Faktor Politik

Rumusan misi pembangunan Kabupaten Aceh Barat untuk mencapai visi yang berhubungan dengan program pengembangan masyarakat sangat terkait erat dengan program community development secara spesifik. Kebijakan pemerintah daerah dapat menjadi “payung” untuk kegiatan community development yang diprakarsai oleh pihak swasta.

Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat, visi Pemda Kabupaten Aceh Barat 2012 – 2017 adalah: “Mewujudkan Aceh Barat yang Makmur, Sehat, dan Berwawasan”. Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut,

salah satu misi pembangunan yang terkait dengan community development adalah misi “Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis, sumberdaya dan pemberdayaan masyarakat”.

Visi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat ini mencerminkan arah pembangunan Kabupaten Aceh Barat dalam masa lima tahun ke depan. Visi ini juga seiring dengan sasaran pokok dan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Barat untuk Tahapan Pembangunan ke-2 tahun 2012-2017 yakni untuk lebih memantapkan penataan kembali Kabupaten Aceh Barat di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.

Dalam visi Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2017 terdapat tiga kata kunci yakni makmur, sehat dan berwawasan. Kata makmur mengandung makna bahwa terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar masyarakat Aceh Barat secara kuantitas dan kualitas dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya melalui pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kata sehat mengandung makna bahwa terciptanya harmonisasi antara masyarakat dengan lingkungannya dalam rangka menjamin tercapainya derajat hidup yang berkualitas baik secara fisik maupun mental; dan kata berwawasan mengandung makna bahwa masyarakat Aceh Barat mendapatkan akses pendidikan yang luas baik formal maupun non formal yang ditunjang dengan teknologi informasi yang berlandaskan Dinul Islam dan budaya Aceh.

Berdasarkan rumusan Strategi pembangunan Kabupaten Aceh Barat, arah kebijakan pembangauna daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2017 dalam hal pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diupayakan melalui program

pemberdayaan masyarakat. Dua kegiatan yang akan dilakukan untuk mendukung program tersebut adalah (1) Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis, sumberdaya dan pemberdayaan masyarakat; dan (2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak resiko bencana.

Program pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program dari subsektor pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat pada sektor pembangunan daerah, yang termasuk dalam kelompok program yang berhubungan dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan. Tujuan program pemberdayaan masyarakat adalah menciptakan kompetisi yang sehat dalam pelaksanaan pembangunan dan menciptakan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berkualitas serta membantu kelompok masyarakat yang selama ini tidak berdaya dan tertinggal untuk menolong dirinya sendiri. Saran program ini adalah masyarakat sipil, swasta dan lembaga swadaya masyarakat serta pemerintah. Kegiatan strategis yang direncanakan dalam program ini adalah peningkatan pendidikan dan keterampilan sumberdaya manusia, dan penyediaan tenaga kerja industri yang ahli dan terampil dalam jumlah dan mutu yang sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis industri (Bapeda Kabupaten Aceh Barat, 2014).

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu lima tahun mendatang dalam upaya mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan potensi perekonomian daerah dengan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten Aceh Barat serta mengkaitkan dengan daerah-daerah atau desa yang masih terisolasi adalah (Bapeda Kabupaten Aceh Barat, 2014):

1. Meningkatkan pembangunan perekonomian yang berbasis perdesaan melalui peningkatan daya saing komoditas unggulan yang berkelanjutan;

2. Meningkatkan ketahanan pangan melalui optimalisasi pengelolaan pertanian dan perkebunan;
3. Pengembangan agroindustri dalam peningkatan nilai tambah produk pertanian yang merupakan Potensi basis daerah;
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengembangan sentra-sentra produksi;
5. Meningkatkan daya saing Aceh Barat melalui kerjasama dan kegiatan investasi baik dalam maupun luar negeri guna mempercepat pembangunan daerah;
6. Peningkatan investasi kepariwisataan dan agroindustri;
7. Meningkatkan pertumbuhan investasi, konsumsi dan daya saing daerah melalui peningkatan pelayanan dan kemudahan perizinan;
8. Meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan peningkatan kualitas tenaga kerja;
9. Meningkatkan skala usaha ekonomi masyarakat dan pemberdayaan UMKM yang mendukung pencapaian MDGs;
10. Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengentasan kemiskinan termasuk pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
11. Mewujudkan Kota Meulaboh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan infrastruktur pendukung dan kelembagaan ekonomi;
12. Pengembangan Kota Meulaboh sebagai simpul transportasi di wilayah barat selatan Provinsi Aceh;
13. Pengembangan Kota Meulaboh sebagai Pusat Pelayanan Jasa Regional; dan
14. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu lima tahun mendatang dalam upaya Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak resiko bencana adalah (Bapeda Kabupaten Aceh Barat, 2014):

1. Meningkatkan kualitas dan integrasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan berdasarkan regulasi;
2. Melaksanakan pembangunan berbasis tata ruang wilayah;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar peningkatan kualitas hidup masyarakat sesuai MDGs 2015;
4. Membangun sarana dan prasarana yang mendukung fungsi Kota Meulaboh sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
5. Mengurangi ketimpangan pembangunan antar kawasan Kota Meulaboh dengan wilayah pedesaan/daerah tertinggal;
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah sesuai dengan kebutuhan, manfaat, potensi dan daya dukung lingkungan yang terpadu, aspiratif, seimbang dan berkelanjutan;
7. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya energi terbarukan dan tidak terbarukan melalui pemanfaatan sumber-sumber energi baru.
8. Peningkatan pembangunan infrastruktur daerah dengan memperhatikan aspek lingkungan dan dampak resiko bencana;
9. Peningkatan perlindungan, pemulihan kawasan kritis, pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara integrasi sebagai modal dasar pembangunan dalam rangka memperbaiki kualitas kehidupan;
10. Meningkatkan upaya mitigasi bencana;
11. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bencana;
12. Penyiapan gampong siaga bencana; dan
13. Mewujudkan Kota Meulaboh yang bersih dan nyaman

c. Faktor Institusional

Lembaga pemerintah yang terkait dengan upaya pengembangan masyarakat di tingkat Kabupaten Aceh Barat adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat, di tingkat kecamatan adalah Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan di tingkat desa adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Adapun kegiatan program kerja lembaga tersebut diantaranya adalah program peningkatan usaha ekonomi desa, program pengembangan teknologi tepat guna dan program lomba pembangunan antar desa atau kelurahan.

Program pembangunan yang berhubungan dengan pengembangan masyarakat ditangani oleh masing-masing dinas terkait, diantaranya adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan UKM, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil.

Wadah komunikasi yang dapat menjembatani kepentingan dari semua *stakeholder* dalam program CD belum ada. Hal ini menyebabkan keterlibatan para *stakeholder* dalam program CD yang dilaksanakan tidak terorganisir, dan kurang optimal sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya. Pembagian tugas dan peranan dari masing-masing *stakeholder* tidak ada sehingga menurunkan efektivitas ketjasama yang terjalin di antara stakeholder.

d. Faktor Ekonomi

Kondisi perekonomian Nasional mencatat bahwa perekonomian Indonesia pada 2012 tumbuh cukup tinggi sebesar 6,3% dan diperkirakan akan meningkat di 2013-2014. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi yang terus meningkat dan investasi yang tetap kuat. Meskipun pertumbuhan 2012 sedikit di bawah target APBN 2012 sebesar 6,5 persen, capaian pertumbuhan pada kisaran 6,3 persen merupakan sebuah prestasi yang patut diapresiasi karena dicapai pada saat perekonomian global mengalami

perlambatan. Sementara itu, Inflasi 2012 mencapai 4,30% (yoy) dan ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi akan tetap terkendali.

Dalam skala Aceh, pada triwulan II 2012, pertumbuhan ekonomi yang hanya 5,59 %. Kondisi ini meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat 5,83% (yoy) dan ini sesuai dengan target RPJM Aceh tahun 2012 yang mematok pertumbuhan ekonomi 5,02 % dan pada tahun 2013 capaian pertumbuhan antara 6,1-6,6% akan tercapai.

Pertumbuhan ekonomi Aceh Barat tiga tahun terakhir ini bernilai positif dan semakin cepat. Tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 adalah sebesar 5persen dengan PDRB 1,2 T. Sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 dan 2011 masing-masing sebesar 5,09 dan 5,24 persen. Nilai PDRB harga konstan pada kedua tahun tersebut adalah 1,26 dan 1,32 T Rupiah.

Sebagai perbandingan dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan Aceh, maka pertumbuhan ekonomi Aceh Barat dari pertumbuhan 12 persen pada tahun 2007 turun menjadi 5,2 pada tahun 2011 dan pertumbuhan ini dibawah dari pada pertumbuhan ekonomi nasional dan Aceh sebagaimana tergambar dari grafik dibawah ini



Gambar 5.7. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Barat dengan Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2007-2011

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Barat tertinggi terjadi pada 2007 sebesar 11,95 persen. Tahun ini pertumbuhan ekonomi ditopang oleh sektor utama yaitu bangunan/konstruksi yang tumbuh sebesar 24,72 persen; perdagangan, hotel dan restoran sebesar 18,22 persen; listrik dan air minum sebesar 17,27 persen dan jasa-jasa sebesar 16 persen. Besarnya kontribusi keempat sektor tersebut sebagai implikasi dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Aceh Barat akibat gempa dan tsunami yang terjadi pada 26 Desember 2004. Kondisi ekonomi Kabupaten Aceh Barat tahun 2008-2011 cenderung konstan. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan tahun 2008 sebesar 5,46 persen menjadi 5,24 persen di tahun 2011 atau terjadi perlambatan aktivitas ekonomi sebesar 2,2 persen selama 4 tahun.

Pemerintah Aceh Barat menandatangani MoU bersama dengan PT. Mifa Bersaudara terkait kesepakatan pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* bagi masyarakat berdomisili sekitar tambang batubara. Penandatanganan kesepakatan bersama dilakukan langsung oleh Bupati Aceh Barat HT Alaidinsyah (Haji Tito) dengan Direktur Utama PT. Mifa Bersaudara Slamet Haryadi.

Dalam kesepakatan tersebut, tertuang jika perusahaan tambang batu bara ini akan menyisihkan 1 persen dari hasil penjualan setiap ton batu bara demi membiayai program social CSR di tengah masyarakat. Menurut Direktur Utama PT. Mifa Bersaudara Slamet Haryadi, Ini telah menjadi komitmen perusahaan untuk menyisihkan 1 persen bagi pembiayaan proram CSR. Dalam realisasi tahun 2013 berjalan, perusahaan ini telah memplotkan Rp 980 juta bagi pembiayaan pelaksanaan sosial ke tengah masyarakat sekitar tambang. Namun, pada tahun 2015 dan tahun 2016, PT. Mifa Bersaudara memiliki target akan beroperasi semaksimal mungkin hingga mencapai angka produksi batubara sebanyak 15 ribu ton sampai 16 ribu ton, sehingga anggaran pendukung dana CSR dapat meningkat menjadi Rp 45 miliar.

e. Faktor Sosial Budaya

Secara kultural masyarakat sekitar perusahaan bersikap pasrah. Mereka terjat dalam berbagai kekurangan sehingga mereka kurang memiliki inisiatif, gairah, kreatif dan kurang dinamis dalam mengubah nasib mereka untuk lebih baik. Struktur sosial masyarakat yang kebanyakan masyarakat menengah ke bawah dengan tingkat pendidikan rendah. Sikap sebagian masyarakat yang "lebih menginginkan umpan dari pada kail". Adat Aceh identik dengan kehidupan yang bemuansa religius dan taat rnenjalankan ibadah serta menjunjung tinggi kaidah-kaidah dan tatanan nilai-nilai budaya Aceh. Hal terse but berpengaruh pada terbentuknya integritas moral dan merupakan landasan yang paling utama dalam melaksanakan program pembangunan.

5.5.2. Pandangan Stakeholder Terhadap Program CD PT. Mifa Bersaudara dan Sistem Kolaborasi diantara Mereka

a. Pandangan Perusahaan

Merupakan komitmen PT. Mifa Bersaudara bahwa membangun lingkungan berarti membangun masyarakatnya, yang mencakup masyarakat di dalam dan di sekitar perusahaan serta masyarakat yang terpengaruh dengan operasional perusahaan. Pelaksanaan program bagi pihak perusahaan merupakan pengejawantahan rasa tanggungjawab perusahaan terhadap masyarakat dalam usaha mencapai kesejahteraan dan kemandirian guna mendukung operasi perusahaan dan membantu pemerintah dalam memperecepat pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan program, selama ini perusahaan cenderung bekerjasama secara langsung dengan pihak masyarakat tanpa melibatkan stakeholder lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk lebih memungkinkan tereapainya efektif dan efisiensi dalam pelaksanaan program.

Pelaksanaan program CD PT. Mifa Bersaudara di bidang peningkatan pendapatan masyarakat sekitar perusahaan disadari pihak perusahaan belum mencapai hasil yang diharapkan. Sementara untuk program CD di bidang-bidang lainnya yakni bidang pembinaan pendidikan dan keagamaan, pembinaan sosial budaya dan bidang penyediaan infrastruktur desa dinilai cukup memuaskan. PT. Mifa Bersaudara memandang bahwa sudah ada kesamaan persepsi mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat namun disusunnya model atau konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat yang jelas dari pihak pemerintah daerah.

Perusahaan menyadari pentingnya kolaborasi antar stakeholder dalam program CD. Kolaborasi merupakan salah satu nilai perusahaan yang dapat menjadi landasan dasar pelaksanaan program CD PT. Mifa Bersaudara. Dengan terjalinnya kerjasama yang sehat antar stakeholder, kebutuhan dan rencana dari masing-masing pihak dapat diketahui sehingga program yang akan dijalankan akan lebih efektif dan efisien.

b. Pandangan Pemerintah Daerah

Program pengembangan masyarakat di sekitar operasi perusahaan lebih dibebankan kepada pihak swasta sendiri. Sedangkan untuk masyarakat luas lainnya, Pemda Kabupaten Aceh Barat (Bappeda) melaksanakan pembangunan melalui dinas-dinasnya.

Pihak pemerintah daerah mengharapkan adanya kerjasama secara intensif antara pihak perusahaan dengan pihak pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam setiap pelaksanaan program CD. Kerjasama tersebut tidak hanya dengan petugas lapangan saja yang bukan merupakan staf yang mempunyai kapasitas pengambil keputusan. Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat memandang bahwa kolaborasi antar semua stakeholder dalam program CD PT. Mifa Bersaudara sangatlah penting untuk mengoptimalkan peran

dari masing-masing pihak dalam berkontribusi sesuai dengan fungsi, kapasitas dan kapabilitasnya.

c. Pandangan Masyarakat

Persepsi masyarakat terhadap bantuan dan keberadaan PT. Mifa Bersaudara cukup baik. Seluruh lapisan masyarakat telah merasakan bantuan yang diberikan perusahaan walaupun masih ada warga yang memiliki persepsi kurang setuju akan tempi jumlahnya relatif sangat sedikit. Disamping itu, keterlibatan masyarakat dalam penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan telah dilakukan sehingga beberapa penduduk setempat bekerja sebagai karyawan perusahaan .

Bekerjasama dengan PT. Mifa Bersaudara birokrasinya panjang dan berbelit-belit. Komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat dinilai masih kurang efektif. Salah satu penyebab kondisi tersebut adalah seringnya pergantian staf perusahaan yang menangani CO. Komunikasi selama ini hanya antara perusahaan dengan tokoh masyarakat atau kepala desa, kepala kampung, dan perwakilan masyarakat tempatan. Komunikasi secara langsung dengan (kelompok) masyarakat masih terbatas. Dalam beberapa kasus, pendekatan seperti itu telah menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat kepada tokoh- tokoh masyarakat.

d. Pandangan Perguruan Tinggi

Salah satu misi Perguruan Tinggi adalah melakukan kegiatan pengembangan masyarakat. Upaya ini ditujukan agar keberadaan institusi ini mempunyai dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Dengan demikian, pada gilirannya terdapat hubungan timbal balik yang harmonis antara masyarakat sekitar dengan perguruan tinggi. Kolaborasi antar stakeholder dalam program CD. PT. Mifa Bersaudara akan dapat menutup gap yang timbul dalam hal tenaga, expertise, dana, dan lain sebagainya yang

diperlukan dalam pelaksanaan program. Universitas Malikussaleh sebagai mitra penelitian ini memiliki tugas sebagai tim peneliti dan penyusun model pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara, dan dalam aplikasi model tersebut keterlibatan Universitas Teuku Umar menjadi sangat penting.

e. Pandangan LSM

LSM Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pos Aceh Barat memandang bahwa program CD merupakan kewajiban moral penanggungjawab usaha sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat dan lingkungannya menimbang dampak yang dihasilkan dari suatu kegiatan usaha. Program CD PT. Mifa Bersaudara selama ini lebih banyak berupa bantuan cuma-cuma dan tidak menyentuh pada kebutuhan utama masyarakat. Pelaksanaan programnya lebih berupa pemberian kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak. Kesejahteraan masyarakat lokal tidak banyak terpengaruh dengan kehadiran perusahaan, bahkan mereka lebih banyak dirugikan karena kehilangan kesempatan mengakses sumberdaya alamnya.

Pihak LSM memandang bahwa manajemen PT. Mifa Bersaudara kurang komunikatif, kurang membuka diri dengan pihak-pihak luar, dan bahkan cenderung defensive. Hal tersebut dapat ditunjukkan dari kerapkalinya pihak perusahaan tidak hadir dalam pertemuan-pertemuan LSM. Walaupun pihak perusahaan hadir, wakil perusahaan yang menghadiri tidak punya wewenang dalam mengambil keputusan di pertemuan.

Kolaborasi berbagai pihak terkait dalam penyelenggaraan program CD. PT PT. Mifa Bersaudara akan mempertegas maksud dan tujuan suatu kegiatan, memperjelas hak dan tanggung jawab dan masing-masing pihak, serta untuk lebih menjamin transparansi kegiatan dan akuntabilitas dari yang terlibat. Sejauh ini belum ada

kerjasama antara LSM dengan PT. Mifa Bersaudara dalam program CD.

Pihak PT. Mifa Bersaudara tidak mungkin menghindari interaksi dengan *stakeholder* lain dalam melaksanakan program CD. Kolaborasi antar *stakeholder* dalam pelaksanaan program CD oleh PT. Mifa Bersaudara pada dasarnya dapat meluncurkan mekanisme kerja dan arus informasi diantara *stakeholder* yang terlibat. Setiap *stakeholder* dapat berkontribusi secara optimal sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya, sehingga berbagai upaya pengembangan masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kolaborasi antara *stakeholder* juga merupakan proses pembelajaran sosial, dimana masing-masing pihak dapat saling merefleksikan pengetahuan (pengetahuan masyarakat, pengetahuan pemerintah, dan pengetahuan pembina lainnya), mendiskusikannya, dan memilih pengetahuan mana yang dapat diterima oleh masyarakat yang bersangkutan. Sehingga kesimpulan-kesimpulan yang telah ditetapkan dan disepakati semua *stakeholder* dapat diterapkan dalam bentuk aksi kolektif.

Pemerintah seharusnya berupaya memaksimalkan layanan, agar interaksi setiap *stakeholder* dalam program CD berjalan baik. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus merupakan fasilitator pembangunan yang dapat menjebatani kerjasama antara pihak swasta dengan masyarakat.

Untuk mendukung terjalannya kolaborasi antara berbagai *stakeholder* dalam program CD, secara hukum diperlukan adanya peraturan-peraturan daerah (Perda) yang spesifik mengenai program CD dari pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat. Peraturan ini menyangkut ketentuan mengenai siapa saja yang bertanggungjawab terhadap program CD, apa hak dan tanggungjawab masing-masing pihaknya. Untuk lebih mendukung pelaksanaan program partisipatif tersebut, perlu ditentukan juga

sistem insentif bagi *stakeholder* yang mendukung program dan konsekwensi bagi *stakeholder* yang tidak menjalankannya.

Secara politik, diperlukan komitmen dan kemauan politik yang kuat dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat terhadap upaya-upaya pengembangan masyarakat. Program CD seyogyanya merupakan bagian penting dari RENSTRA (strategic planning) kabupaten dan juga merupakan bagian kritis dari proses pembangunan yang memerlukan penanganan secara seksama. Untuk mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan program, diperlukan kebijakan dari pemerintah daerah kabupaten Aceh Barat yang secara spesifik mengatur program pemberdayaan masyarakat.

Faktor politik merupakan faktor terpenting dibandingkan dari faktor-faktor yang lainnya. Hal ini disebabkan keberhasilan dari program CD PT. Mifa Bersaudara sangat ditentukan oleh strategi dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat sendiri dalam mengembangkan kapasitas pihak-pihak terkait dalam program CD. Terutama berkenaan dengan dukungan kebijakan, dukungan kelembagaan, dukungan dana, dukungan sumberdaya, dukungan teknis dan sistem monitoring dan evaluasi.

Pemerintah daerah merupakan pihak yang berkepentingan dengan pembangunan di daerahnya sehingga dia rnesti menggunakan kewenangannya untuk menentukan arah kebijakan pembangunan di daerahnya. Untuk itu diperlukan berbagai kebijakan dari pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Barat yang mampu mendukung dan memfasilitasi program CD PT. Mifa Bersaudara agar program tersebut berkembang dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah bagaimana pihak pemerintah daerah tersebut mampu mensinergikan pendekatan dari program CD dan kebijakan pemerintah daerah.

Secara kelembagaan, pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat perlu melakukan pengorganisasian terhadap keterlibatan para *stakeholder* yang berkontribusi dalam upaya pengembangan

masyarakat dan terhadap interaksi lembaga-lembaga pemerintah dengan stakeholder non-pemerintah. Untuk mendukung kolaborasi tersebut diperlukan revitalisasi kelembagaan dengan cara membangun kelembagaan yang mampu memfasilitasi kegiatan komunikasi dan pertukaran informasi antar stakeholder, memantau berjalannya program, secara partisipatif mendukung kerjasama antar stakeholder dan membentuk *Social Control*. Lembaga ini berfungsi sebagai koordinator dan fasilitator dan kolaborasi antara berbagai *stakeholder*.

Secara ekonomi, mesti ada anggaran khusus dari pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat untuk program CD. Alokasi biaya CD tersebut tidak hanya terbatas pada biaya programnya saja, akan tetapi termasuk untuk kegiatan penelitian khusus program CD melalui kerjasama dengan pihak perguruan tinggi, mengadakan pertemuan-pertemuan dan memfasilitasi komunikasi antara berbagai *stakeholder*. Dukungan dana ini lebih terkait dengan masalah dukungan administratif lembaga pemerintah daerah dalam program CD. Disamping sumber dana dari alokasi anggaran pemerintah daerah, dapat juga diupayakan dengan mengefektifkan partisipasi pihak swasta dan bahkan dari partisipasi masyarakat sendiri,

Secara sosial budaya, pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat bertanggungjawab untuk memastikan bahwa program CD yang ada strategis dan dipahami semua *stakeholder*. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dari masing-masing *stakeholder* mengenai program CD, pihak pemerintah daerah perlu penyediaan informasi dan pengetahuan CD yang memadai. Sehingga setiap *stakeholder* diupayakan untuk dapat menghargai program CD, mendukung program yang direncanakan, bersedia untuk terlibat dan berkolaborasi dengan *stakeholder* lain dalam pengelolaan program.

Semua *stakeholder* harus didukung oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat untuk berperan aktif dalam program CD PT. Arara Abadi, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengawasan dan pengevaluasian. Agar *stakeholder* bersedia dan aktif berpartisipasi dalam tahapan-tahapan tersebut, dapat diupayakan melalui: pelibatan *stakeholder* dalam kepanitiaan, dengan mengadakan pertemuan reguler; menyelenggarakan *group meetings*; penunjukan *contact person* untuk aspek tertentu; mengembangkan kerjasama antar *stakeholder*, penerbitan bulletin, buku dan pengembangan website CD.

5.5.3. Jejaring dan Sinergi Program

5.5.3.1. Strategi Mensinergikan Program CD dengan Pembangunan Daerah

Untuk "menjembatani" perbedaan antara kedua kelembagaan pemerintah dengan kelembagaan masyarakat, maka diperlukan prasyarat sebagai berikut (Kolopaking, 2002):

Pertama, dibutuhkan *political-will* pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat, antara lain berupa: pengenalan dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat; menaruh kepercayaan bahwa identitas, budaya, kebiasaan, tata nilai lokal, dan pengetahuan lokal itu mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap model pengelolaan program CD yang produktif dan lestari; serta memahami masyarakat sebagai manusia yang memiliki harkat yang tinggi, dan dengan demikian patut didengar aspirasinya.

Kedua, setiap aturan formal termasuk sistem insentifnya disusun dengan mengakomodasikan kebutuhan masyarakat. Ini merupakan model konkret yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah itu percaya kepada masyarakatnya.

Ketiga, setiap tindakan sosialisasi hukum kepada masyarakat tidak dilakukan secara koersif, meski hukum itu sendiri pada hakekatnya bersifat koersif. Sosialisasi hendaknya dipandang sebagai

proses pembelajaran yang dialogik. *Keempat*, agar dihasilkan organisasi pemerintahan daerah yang lebih adaptif terhadap kepentingan masyarakat, diperlukan desentralisasi penanganan masalah CD dan devolusi pembuatan keputusan dari tingkat kabupaten ke desa harus diefektifkan.

Kelima, prakarsa pembangunan "jembatan komunikasi" seperti yang dituangkan dalam empat butir pertama, hendaknya datang dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat.

5.5.3.2. Strategi Kebijakan Pemerintab Daerah

Dalam upaya untuk mewujudkan misi pembangunan daerah Kabupaten Aceh Barat dan mengimplementasikan konsep pemberdayaan masyarakat dalam rangka mensinergikan program pengembangan masyarakat dan pembangunan daerah, maka diperlukan strategi kebijakan program pembangunan pemerintah daerah yang mencakup penguatan lembaga dan organisasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat (Haeruman, 2001).

a. Penguatan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas lembaga ekonomi masyarakat dan sosial masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat setempat. Lembaga ini diharapkan dapat berperan sebagai wadah bagi pengembangan kegiatan usaha produktif, interaksi dan ketahanan sosial, pengelolaan sumberdaya dari pemerintah dan potensi masyarakat, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Sasaran program yang ingin dicapai adalah berkembangnya kelompok-kelompok usaha masyarakat (koperasi) di yang dapat meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik.

b. Pemberdayaan Masyarakat

Strategi pokok dari pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat dalam pemberdayaan masyarakat adalah (i) memperkuat lembaga dan organisasi masyarakat dengan membuka ruang yang seluas-luasnya bagi inisiatif masyarakat, (ii) mengurangi berbagai aturan yang menghambat, (iii) mengembangkan budaya kemandirian, keswadayaan dan kesetiakawanan, dan (iv) mengembangkan jaringan sumberdaya, lingkungan alam dan sosial-budaya setempat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, harkat dan martabat masyarakat dalam bentuk perlindungan agama dan adat budayanya, harta bendanya, jiwa raganya, usaha kehidupannya dan masa depannya.

5.6. Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang Batu Bara

5.6.1. Peran Serta Stakeholder

a. PT. Mifa Bersaudara

Pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan disemua aspek dalam rangka menciptakan kestabilan disemua sektor bukan hanya tanggungjawab pemerintah semata tetapi juga berada di pundak seluruh *stakeholder* yang ada diwilayah tersebut. Terkait dengan hal tersebut maka keberadaan PT. Mifa Bersaudara yang bergerak dalam bidang tambang barubara di wilayah Aceh Barat juga ikut berperan dalam rangka mengisi pembangunan sosial masyarakat yang ada dikawasan tambang khususnya dan Aceh Barat pada Umumnya. Komitmen ini di tunjukan dengan dilakukannya penandatanganan MoU antara Pemerintah Aceh Barat dengan PT. Mifa Bersaudara terkait kesepakatan pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) bagi masyarakat berdomisili sekitar tambang batubara. Penandatanganan kesepakatan bersama dilakukan langsung oleh Bupati Aceh Barat HT Alaidinsyah (Haji Tito) dengan Direktur

Utama PT. Mifa Bersaudara Slamet Haryadi. Dalam kesepakatan tersebut, tertuang jika perusahaan tambang batu bara ini akan menyisihkan 1 persen dari hasil penjualan setiap ton batu bara demi membiayai program CSR di tengah masyarakat. Yang merupakan komitmen perusahaan bagi pembiayaan program CSR.

Dalam realisasi tahun 2013 berjalan, perusahaan ini telah memplotkan Rp 980 juta bagi pembiayaan pelaksanaan sosial ke tengah masyarakat sekitar tambang yang merupakan kontribusi perusahaan terhadap perkembangan ekonomi masyarakat secara mandiri. Namun, pada tahun 2015 dan tahun 2016, PT. Mifa Bersaudara memiliki target akan beroperasi semaksimal mungkin hingga mencapai angka produksi batubara sebanyak 15 ribu ton sampai 16 ribu ton, sehingga anggaran pendukung dana CSR dapat meningkat menjadi Rp 45 miliar.

Semua yang dilakukan ini adalah wujud dari komitmen PT. Mifa Bersaudara yang berada dibawah Group Reswara yang berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tumbuh dan berkembang bersama masyarakat Aceh Barat dan Aceh secara keseluruhan. Komitmen untuk ambil bagian dalam proses pembangunan sebagai wujud tanggungjawab sosial serta mengakomodir Qanun Provinsi Aceh Nomor 12 tahun 2012 yang mengatur tentang kewajiban perusahaan untuk melaksanakan program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka implementasi tanggungjawab sosial perusahaan diwujudkan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Aceh (PPMA).

Konsentrasi PPMA pada *Community Empowerment* (Pemberdayaan Masyarakat) yang bertitik tolak dari potensi daerah, aspirasi dan kebutuhan masyarakat Aceh khususnya disekitar tambang. Dimasa mendatang, program PPMA akan dikoordinir pelaksanaannya melalui sebuah yayasan yang dibentuk bersama para *stakeholder*. Secara umum dalam melaksanakan Program

Pemberdayaan Masyarakat Aceh (PPMA) berpedoman pada 7 pilar program pengembangan masyarakat, yaitu:

1. Peningkatan kesehatan masyarakat
2. Partisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan dan melestarikan seni budaya daerah
3. Pendidikan dan pelatihan
4. Pengembangan sarana desa
5. Pengelolaan sumberdaya berbasis lahan
6. Kemitraan UMKM dan kewirausahaan
7. Pelestarian lingkungan hidup dan konservasi keanekaragaman sumberdaya hayati.

Selanjutnya agar semua program berjalan tepat sasaran dan sesuai dengan perencanaan yang ada serta terlaksana dengan baik maka ada 7 tahapan yang harus dilalui, yaitu:

1. Study peninjauan kebutuhan dengan Metode PRA (*Participatory Rural Appraisal*)/ Pengkajian Keadaan Desa Secara Partisipatif.
2. Merumuskan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Program Yang Berkoordinasi Dengan Pemerintah Gampong, Kecamatan & Kabupaten serta instansi terkait lainnya.
3. Program dan alokasi biaya harus dengan Persetujuan Direksi PT. Mifa Bersaudara dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
4. Implementasi (Pemdampingan)
5. *Monitoring*
6. Evaluasi
7. Pelaporan

Salah satu peranserta PT. Mifa Bersaudara dalam upaya mendukung pembangunan daerah adalah melaksanakan program *Community Development* (CD). Program CD yang dilakukan meliputi beberapa bidang, yaitu bidang peningkatan pendapatan masyarakat

sekitar tambang pada bidang pertanian dan kehutanan, bidang pembinaan pendidikan dan keagamaan, bidang pembinaan sosial-budaya dan bidang penyediaan infrastruktur desa.

Program CD PT. Mifa Bersaudara cenderung dikelola pihak perusahaan sendiri, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasinya. Rencana program CD tahunan dikoordinasikan dengan pihak pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat. Sedangkan untuk setiap pelaksanaan program CD pihak perusahaan berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah kecamatan dan desa. Pelaksanaan program CD dilaporkan PT. Mifa Bersaudara ke Bappeda Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh setiap triwulan dan tahunan.

b. Masyarakat

Agar Program Pemberdayaan Masyarakat Aceh (PPMA) dapat berjalan dengan baik maka Peranserta masyarakat sebagai penerima manfaat langsung dalam program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) PT. Mifa Bersaudara mutlak diperlukan. Selain sebagai pelaksana program, dalam hal ini masyarakat penerima manfaat juga dilibatkan dalam proses perencanaan, penyusunan rencana tindak lanjut, implemetasi dan pengawasan. Program pendampingan juga disediakan oleh pihak perusahaan. Hal ini ditempuh agar Program CSR dapat berjalan dengan baik serta mampu menciptakan "keseimbangan dinamis" dan "dialektis" antara pendekatan "*bottom up*" dan "*top down*".

Peranserta masyarakat dalam program CD PT. Mifa Bersaudara lebih banyak dalam pelaksanaan program yang dijalankan dari pihak perusahaan. Peranserta mereka pada tahap perencanaan program berupa menyampaikan usulan program baik lisan melalui petugas CD lapangan maupun secara tertulis dengan mengirimkan proposal usulan program ke perusahaan atau mempercayakan aspirasinya kepada pimpinan gampong/tokoh

masyarakat. Tidak ada keterlibatan masyarakat dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. Pelaksanaan program CD dilaksanakan melalui Kelompok Pembudidayaan Nelayan / Kegiatan Produksiserta Nelayan dan Pembudidaya, dimana mereka melakukan pengolahan dan pemasaran hasil produksi sesuai dengan bidang keahlian dan pengalaman masing-masing. Aktivitas pemasaran dilakukan melalui koperasi petani yang juga melakukan penyediaan, pengelolaan dana bergulir/kredit bagi petani.

c. Pemerintah Daerah

Dalam rangka mensinergikan berbagai program pembangunan di wilayah Aceh Barat yang dilakukan oleh *semua stakeholder* maka peran pemerintah sangat diperlukan. Berkaitan dengan program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) yang diimplementasikan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Aceh (PPMA) yang dilaksanakan oleh PT. Mifa Bersaudara selalu melibatkan pihak pemerintah. Semua rencana tindaklanjut yang telah disusun secara bersama selanjutnya dikoordinasikan kembali dengan pihak Pemerintah Gampong, Kecamatan dan Kabupaten serta instansi terkait lainnya. Selanjutnya pada proses penetapan program dan penyalokan biaya juga harus dengan persetujuan Direksi PT. Mifa Bersaudara dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Begitu juga dalam hal implementasi dan monitoring program pihak pemerintah melalui instansi terkait tetap terlibat secara aktif.

Untuk mewujudkan akuntabilitas maka pihak PT. Mifa Bersaudara diwajibkan untuk menyusun dan menyerahkan laporan secara berkala kepada semua pihak khususnya pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Keterlibatan pihak pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat terhadap program CD PT. Mifa Bersaudara selama ini masih terbatas pada tahapan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring program. Pada tahap perencanaan, pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat mengundang semua pihak swasta

untuk mempresentasikan rencana program CD masing-masingnya setiap akhir tahun pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda), musyawarah tersebut dihadiri pihak pemerintah daerah (kabupaten, kecamatan dan desa), DPRD dan pihak swasta. Rencana program CD yang akan dijalankan oleh pihak swasta disesuaikan dengan program pembangunan pihak pemerintah daerah.

Keterlibatan pihak pemerintah daerah dalam pelaksanaan program CD PT. Mifa Bersaudara terbatas pada keterlibatan PPL pada berbagai program usaha pertanian dan pemasaran hasilnya. Peran pemerintah daerah dalam pemasaran terbatas pada pemberian kesempatan pada PT. Mifa Bersaudara untuk melakukan promosi hasil kegiatan CD pada berbagai pameran pembangunan yang diadakan. Dalam hal monitoring, pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat menerima laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan kegiatan CD dari perusahaan. Tidak ada evaluasi terhadap hasil program CD yang telah dilaksanakan pihak swasta.

d. Perguruan Tinggi

Kontribusi perguruan tinggi Universitas Teuku Umar (UTU) dalam program CD PT. Mifa Bersaudara terbatas pada tahap perencanaan program. Peranserta pihak perguruan tinggi dengan PT. Mifa Bersaudara dalam hal pendampingan pelaksanaan program CD, monitoring dan evaluasi program belum ada.

Peran serta UTU terhadap pembangunan daerah, berupa kerjasama antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UTU dengan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat. Dari kerjasama tersebut dihasilkan pemikiran dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang berorientasi pada karakter ekosistem, peranserta masyarakat, kearifan tradisi masyarakat tempatan dan keadilan ekonomi serta perubahan lingkungan global. Perguruan tinggi ini juga memberikan masukan kepada pihak pemerintah

daerah dalam hal penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Propeda.

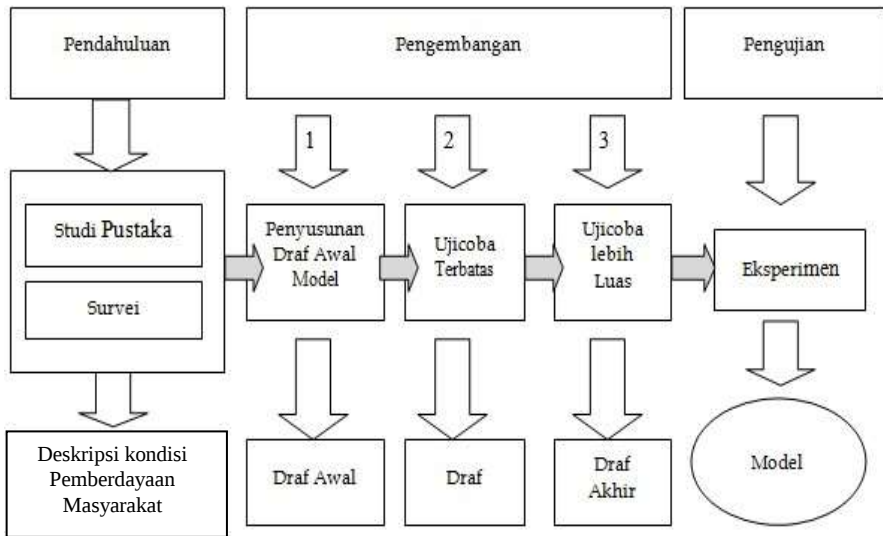
e. Lembaga Swadaya Masyarakat

Keterlibatan pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam program CD PT. Mifa Bersaudara secara langsung tidak ada. Peranan LSM selama ini lebih banyak pada pembinaan masyarakat untuk menyadari hak- kewajibannya dan memberikan kontrol sosial terhadap pelaksanaan program-program pembangunan. Wujud pembinaan masyarakat dan kontrol sosial tersebut biasanya disampaikan melalui tulisan di media masa yang memungkinkan semua *stakeholder* mengetahuinya.

Kepada pihak pernerintah, LSM berkontribusi dalam memberikan tanggapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Disamping itu juga, LSM memberikan pandangan aspek sosial-lingkungan kepada DPRD mengenai program pembangunan dalam penyusunan Pembentukan Tata Ruang.

5.6.2. Proses Pembentukan, Pengembangan, dan Pengujian Model

Proses pembentukan, pengembangan, dan pengujian model dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Metode Penelitian dan Pengembangan (*Research and Development*). Metode ini dirancang untuk mengembangkan suatu produk atau model baru dan atau menyempurnakan produk atau model yang telah ada dengan langkah-langkah yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode ini secara umum mengacu pada Gall dan Borg (1989), Sukmadinata (2005) memodifikasi untuk menyederhanakannya menjadi tiga tahap utama, yaitu pendahuluan, pengembangan, dan pengujian model.



Gambar 5.8. Proses Pembentukan, Pengembangan, dan Pengujian Model. Sumber: Gall dan Borg (1989), Sukmadinata (2005).

Metode ini dirancang untuk mengembangkan suatu produk baru dan atau menyempurnakan produk yang telah ada dengan langkah-langkah yang dapat dipertanggungjawabkan (Sukmadinata, 2005; 163 - 145). Produk yang dikembangkan dalam penelitian adalah suatu Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang Batubara Berbasis Sinergisitas Stakeholder Dan Manajemen Ekoregion.

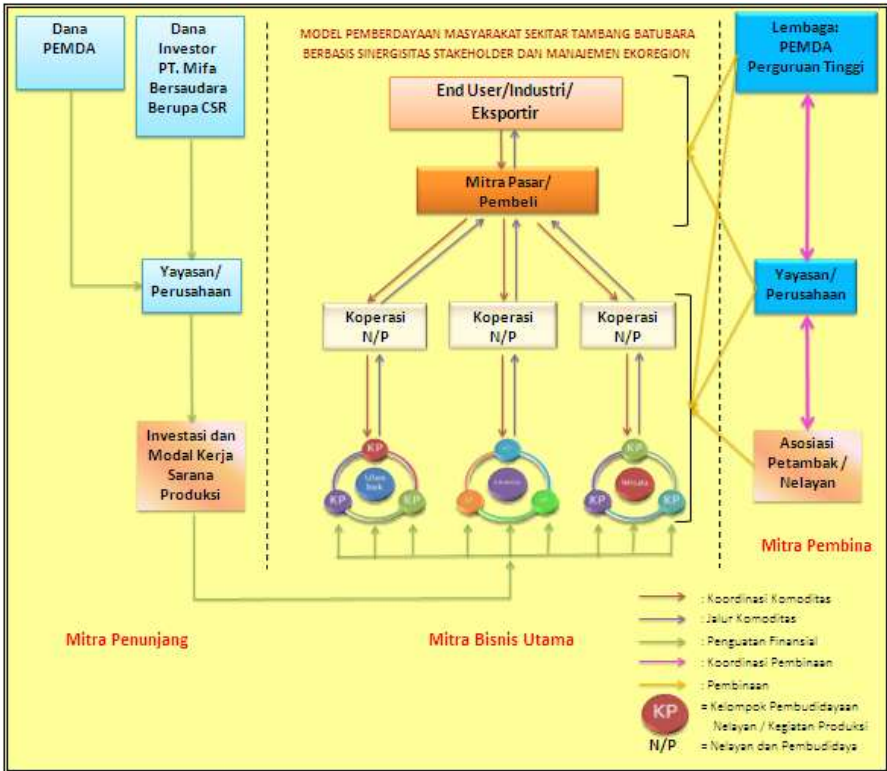
Berdasarkan pada langkah penelitian ini secara umum mengacu pada pendapat Gall dan Borg (1989) di atas, Sukmadinata (2005:189) memodifikasi untuk menyederhanakannya menjadi tiga tahap utama, yaitu pendahuluan, pengembangan, dan pengujian, seperti terlihat pada gambar 5.8.

Penelitian pendahuluan, yaitu tahap persiapan untuk pengembangan model. Tahap ini terdiri atas dua langkah yaitu studi kepustakaan dan survei lapangan. Tahap pengembangan terdiri dari

tiga kegiatan yaitu pengembangan draf awal, uji coba model terbatas, dan uji coba lebih luas. Tahap ketiga, adalah validasi yaitu melakukan penelitian dengan menggunakan metode eksperimen antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen.

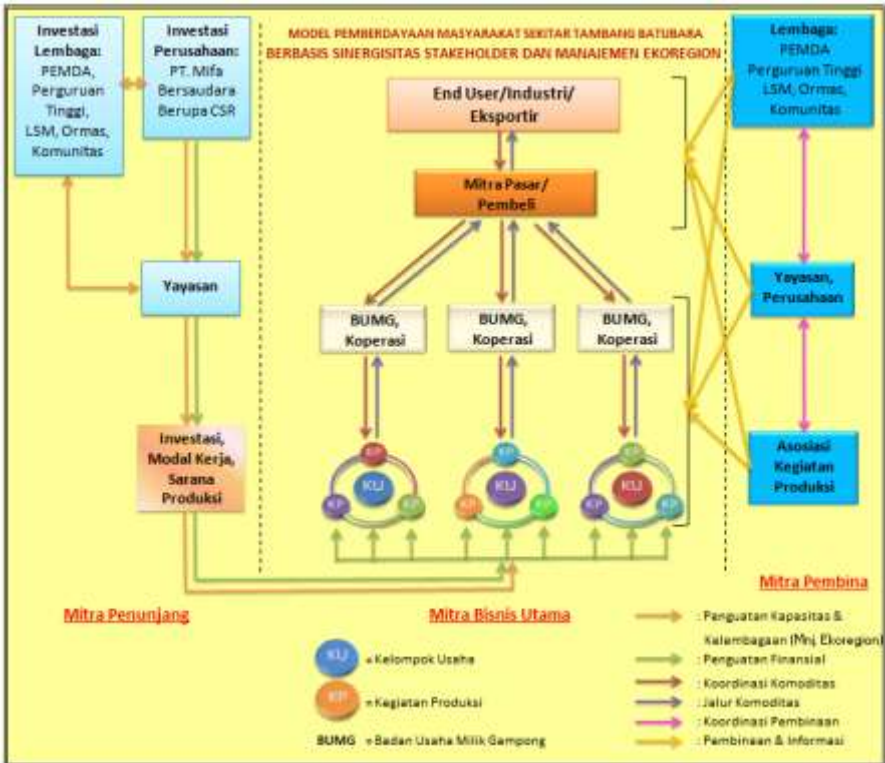
Penelitian ini menggunakan prosedur Research and Development (R&D) (Borg,R.W & Goll, 2003) dengan target terumuskannya Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang Batubara Berbasis Sinergisitas Stakeholder dan Manajemen Ekoregion disusun sebagai salah satu inisiatif proses sinergisitas kelembagaan, dengan tujuan untuk motivasi masyarakat dan bukan untuk menjejalkan konsep kelembagaan salah satu pihak saja, namun untuk mengadaptasikan sinergisitas kelembagaan *stakeholder* yang ada. Masyarakat akan temotivasi bukan dengan imbalan material, melainkan dengan menciptakan "rasa memiliki" melakukan pemberdayaan, dan melembagakan kekuatan masyarakat (Roy, 1992 dalam Kolopaking, 2002). Penelitian ini diawali dengan mengkaji berbagai literatur, peraturan, pedoman penyelenggaraan pembelajaran dan survey. Kunjungan ke lokasi tambang batu bara PT. Mifa Bersaudara dan Bappeda Kabupaten Aceh Barat. Diskusi dengan pelaksanaan program, praktisi maupun masyarakat dilakukan untuk mengamati pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan selama ini. Hasil dari dua kegiatan pada tahap pertama merupakan bahan kajian untuk membuat perencanaan kegiatan. Berbagai masukan tersebut diseminarkan dengan melibatkan para pakar dan praktisi untuk mendapatkan tanggapan tentang model yang akan dikembangkan.

Untuk "menjembatani" perbedaan antara *stakeholder*, potensi konflik dapat ditransformasi menjadi potensi kooperatif yang sinergis (Kolopaking, 2002), maka diperlukan model sebagai berikut:



Gambar 5.9. Draft Awal Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang Batubara Berbasis Sinergisitas Stakeholder Dan Manajemen Ekoregion.

Tahapan selanjutnya adalah mengadakan *workshop* dan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk merancang Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang Batubara Berbasis Sinergisitas Stakeholder dan Manajemen Ekoregion. Hasil perumusan model kemudian divalidasi oleh kelompok ahli. Setelah validasi, tahap selanjutnya adalah revisi yang menghasilkan model pemberdayaan masyarakat. Hasil ujicoba dan pengujian terhadap model adalah sebagaiberiut:



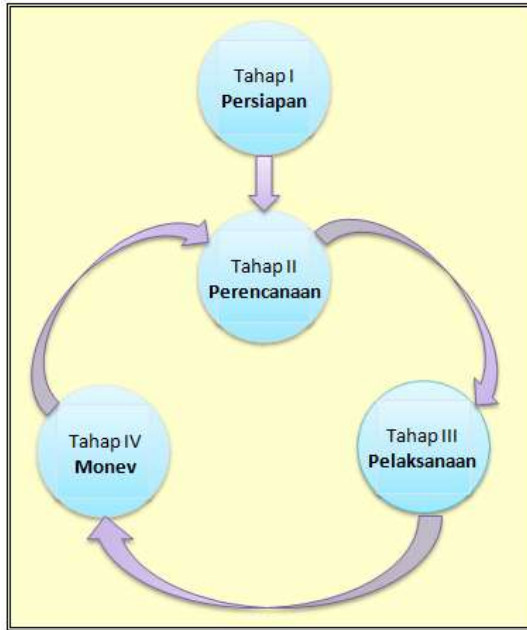
Gambar 5.10. Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang Batubara Berbasis Sinergisitas Stakeholder Dan Manajemen Ekoregion

5.6.3. Tahapan Utama dalam Model PISS-ME

Seperti upaya-upaya pengembangan lain yang dilakukan dalam kerangka mencapai tujuan pembangunan yang melalui tahapan dalam penerapannya, Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang Batubara Berbasis Sinergisitas Stakeholder dan Manajemen Ekoregion (Model PISS-ME) memiliki empat tahapan utama yang berada dalam satu siklus pengelolaan Model Pemberdayaan Masyarakat yang berkelanjutan. yaitu:

- Tahap I : Persiapan
- Tahap II: Perencanaan

- Tahap III: Pelaksanaan
- Tahap IV: Monitoring dan Evaluasi (Monev)



Gambar 5.11. Tahapan Utama dalam Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang Batubara Berbasis Sinergisitas Stakeholder dan Manajemen Ekoregion (Model PISS-ME).

Tahap I merupakan tahap awal yang diperlukan oleh daerah ketika akan memulai penerapan Model PISS-ME. Sementara itu, Tahap II sampai Tahap IV merupakan tahap-tahap yang secara langsung berada dalam penerapan Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang Batubara Berbasis Sinergisitas Stakeholder dan Manajemen Ekoregion (Model PISS-ME). Proses yang ada di dalam Tahap II sampai IV tidaklah berjalan secara linear melainkan dalam

satu siklus. sehingga akan menjadi proses yang terus berulang dan berkelanjutan.

a. Tahap I: Persiapan

Tahap ini dimaksudkan sebagai tahap awal atau persiapan yang perlu dilakukan dalam rangka memulai menerapkan pendekatan Model PISS-ME. Sebagian besar kegiatan dalam tahap ini terkait dengan penyiapan kelembagaan Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang Batubara Berbasis Sinergisitas Stakeholder dan Manajemen Ekoregion (Model PISS-ME). Tahap ini terdiri tiga langkah yaitu:

- Langkah I : Melakukan sosialisasi. penyebaran informasi dan propaganda pendekatan Model Pemberdayaan Masyarakat,
- Langkah2: Membentuk organisasi pelaksana Model Pemberdayaan Masyarakat di daerah
- Langkah3 : Melakukan analisis terhadap kondisi saat ini.

b. Tahap II: Perencanaan

Sebelum memulai pada tahap pelaksanaan Model PISS-ME itu sendiri. daerah harus melalui tahap perencanaan. Tahap ini dimaksudkan agar daerah mampu merencanakan secara baik dan tepat pelaksanaan Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang Batubara Berbasis Sinergisitas Stakeholder dan Manajemen Ekoregion (Model PISS-ME). Langkah yang termasuk ke dalam tahapan ini adalah:

- Langkah 4: Mengidentifikasi dan menentukan kluster ekonomi sebagai fokus Model Pemberdayaan Masyarakat
- Langkah 5: Diskusi Forum kemitraan untuk menyusun strategi dan rencana tindak lanjut

c. Tahap III: Pelaksanaan

Tahap III adalah tahap pelaksanaan yaitu melaksanakan seluruh strategi dan agenda program Model PISS-ME yang telah ditetapkan pada Tahap II. Langkah-langkah yang dilakukan pada Tahap III ini lebih ditujukan pada hal-hal yang sangat penting yang sangat dianjurkan untuk dilakukan dan tidak ditinggalkan dalam proses pelaksanaan agenda program dan kegiatan yang terkait dengan Tahap II, apapun strategi Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang Batubara Berbasis Sinergisitas Stakeholder dan Manajemen Ekoregion (Model PISS-ME) yang dipilih. Sedangkan isi kegiatan dari setiap langkah pada Tahap III akan sangat fleksibel baik dari jenis dan volume kegiatan, tergantung pada strategi dan agenda program Model PISS-ME yang dipilih. Secara umum Tahap III ini terdiri dari 5 langkah yaitu:

- Langkah 6: Mengembangkan dan memperkuat kapasitas, kemampuan dan ketrampilan kelompok usaha
- Langkah 7: Mengembangkan, memperluas pasar dan melakukan promosi kelompok usaha
- Langkah 8: Membangun kerja sama berkelanjutan.

d. Tahap IV: Monitoring dan Evaluasi

Walaupun diletakkan pada tahap terakhir, kegiatan monitoring dan evaluasi tidak selalu harus diletakkan di akhir kegiatan Model PISS-ME. Hal ini karena pada prinsipnya kegiatan Model Pemberdayaan Masyarakat merupakan siklus sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi juga sangat penting dilakukan sepanjang pelaksanaan Model Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Tambang Batubara Berbasis Sinergisitas Stakeholder dan Manajemen Ekoregion (Model PISS-ME). Tahap ini terdiri dari 1 langkah yaitu:

- Langkah 9: Membangun sistem dan melaksanakan monitoring dan evaluasi.

Peran *Stakeholder* dalam tahapan utama Model PISS-ME, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

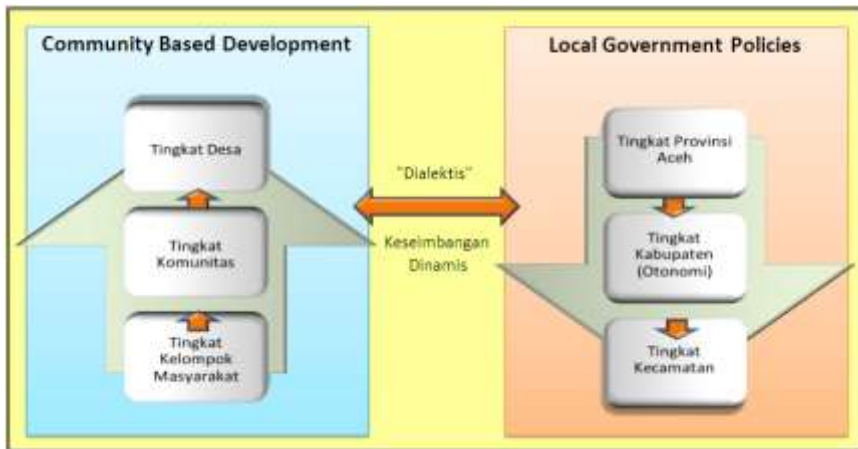
Tabel 5.3. Peran Stakeholder dalam tahapan utama Model PISS-ME

No Stakeholder	Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 PT. MIFA BERSAUDARA	√	√	-	√	-	√	-	√	√
2 PEMDA MEULABOH	√	√	-	√	√	√	√	√	√
3 PERGURUAN TINGGI	√	√	-	√	√	√	√	√	√
4 LSM, ORMAS, MEDIA	√	√	-	√	√	√	√	√	√
5 KOMUNITAS	-	-	-	-	√	√	-	√	-
6 YAYASAN	-	-	√	√	√	√	√	√	√
7 KELOMPOK USAHA	-	-	-	-	-	√	√	√	-
8 PERBANKKAN	-	-	-	-	√	√	√	-	-
9 ASOSIASI	-	-	-	-	√	√	√	-	-

Pelaksanaan program-program partisipatif tersebut dapat *sustain* dan *survive* apabila didukung dengan kebijakan makro yang mampu "memahami" program-program tersebut dan secara institusional mampu memberikan "insentif" dalam pelaksanaannya. Secara komprehensif, proses implementasi program pengembangan masyarakat perlu didekati dengan "rnensinergikan" pendekatan "*bottom up*" (beragam program mikro) dan "*top down*" (kebijakan makro) (Tenny, 2002).

Program CD harus dapat menciptakan "keseimbangan dinamis" dan "dialektis" antara pendekatan "*bottom up*" dan "*top down*". Untuk itu, strategi pengembangan dan peran kelembagaan perlu didekati dengan upaya-upaya "*community based development*" (yang bersifat "*bottom up*") dan pengembangan proses-proses

kebijakan di tingkat pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang mampu mendukung dan memfasilitasi *community based development* (CBO) tersebut (Tenny, 2002) (Lihat Gambar 5.12).

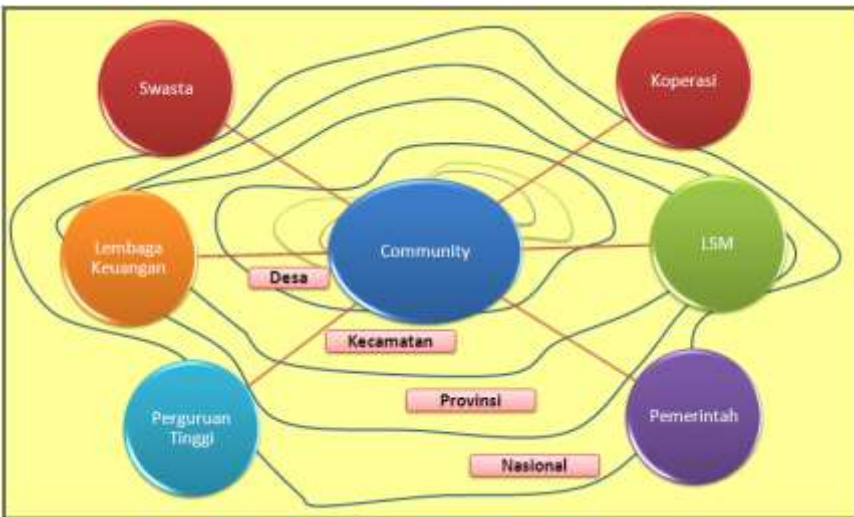


Gambar 5.12. Keseimbangan Dinamis dan Hubungan Dialektis Antara *Community Based Development* dan *Local Government Policies*

Pengembangan usaha-usaha produktif yang berbasiskan kepada komunitas diharapkan dapat melibatkan *stakeholder* yang lain (kelembagaan kolaboratif), seperti organisasi pemerintahan dan berbagai organisasi internasional. Meskipun demikian, jejaring ini tidak akan mengadopsi pendekatan birokratis atau teknokratis. Keberhasilan jejaring sebagai media untuk perumusan *policy* menjadi sangat penting, tetapi ini semua tergantung pada komitmen semua *stakeholder* dalam jejaring tersebut. Gambaran mengenai jejaring kelembagaan berbasis komunitas ditunjukkan pada Gambar 5.13 (Tonny, 2002).

Terdapat beragam institusi dalam suatu komunitas, meskipun sangat sedikit jumlahnya, yang bergerak dalam usaha-usaha produktif yang berbasiskan kepada komunitas dan telah

melembaga, baik di sektor pertanian maupun non-pertanian. Jejaring kelembagaan kolaboratif yang akan dikembangkan harus mampu menjalin hubungan berdasarkan prinsip kesetaraan dengan institusi-institusi tersebut. Oleh karena itu, sistem jejaring yang dibentuk harus mempertimbangkan mekanisme tradisional. Hal-hal penting dalam membangun jejaring yang ada yakni menyelamatkan jaringan pasar yang sudah ada dan mencabut aturan main yang merugikan masyarakat (Tonny, 2002).



Gambar 5.13 Jejaring Kelembagaan Berbasis Komunitas

Dalam hal pendanaan kegiatan produktif, peranan pemerintah lokal bersifat sebagai fasilitator bukan sebagai donatur. Pemerintah lokal perlu mengalokasikan dana untuk masyarakat lapisan bawah atau pengusaha kecil. Dalam hal ini penguatan kelembagaan merupakan hal penting dalam pemberdayaan masyarakat. Untuk itu harus ada kesepakatan, bahwa harus dimulai dengan penguatan kelembagaan dan alokasi dana. LSM yang bergiat dalam pemberdayaan masyarakat bisa melengkapi kegiatan usaha-usaha produktif (Tonny, 2002).

Apabila dilandasi dengan respon yang baik serta prinsip-prinsip partisipatori, maka hasil pemikiran *stakeholder* di tingkat lokal atau nasional perlu dikembalikan pada jejaring di tingkat komunitas dan lokal, sehingga rumusan-rumusan dan jejaring ini perlu rnendapat tanggapan dari seluruh masyarakat. Jaringan kelembagaan berbasis komunitas tidak hams diformalkan (Tonny, 2002).

5.7. Rancangan Program

a. Rancangan Program Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip kesetaraan bagi para stakeholder merupakan sebuah kunci keberhasilan dalam membangun kolaborasi. Akan tetapi menurut kenyataan di lapangan, masyarakat lokal sebagai stakeholder berada pada posisi paling lemah sehingga diperlukan pemberdayaan. Melalui kegiatan pendampingan diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan rnasyarakat lokal, sehingga pada saatnya nanti mereka akan dapat memiliki peran yang sebanding dengan stakeholder yang lainnya. Dengan demikian posisi rnereka dapat disejajarkan dengan stakeholder tainnya.

Rancangan program pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan kegiatan pendampingan, melalui beberapa upaya yang diantaranya adalah (Kaswinto, 1999):

1. Pembentukan dan Pengorganisasian Sistem Kelembagaan. Kegiatan ini diawali dengan pembentukan kelompok-kelompok dampingan oleh pihak. pemerintah desa. Melalui mekanisme kelompok akan dibangun konsensus- konsensus atau komitmen bersama untuk menyelesaikan persoalan komunitas. Melalui kegiatan kelompok juga diharapkan dapat digali ide-ide atau gagasan yang selanjutnya akan dikembangkan secara bertahap sebagai proses pembelajaran partisipatif demi kemajuan kelompok dan masyarakatnya. Antar kelompok juga dapat rnembentuk networking baik di

bidang kegiatan usaha produktif, sharing pengetahuan dan pengalaman, informasi dan yang lebih penting adalah dalam rangka menghimpun kekuatan bersama sehingga mereka memiliki daya tawar (*bargaining position*) yang lebih kuat.

2. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia, Peningkatan kualitas sumberdaya masyarakat dilakukan melalui kegiatan- kegiatan pelatihan, bejajar bersama, diskusi kelompok, diklat, magang, studi banding, seminar, dan sebagainya. Hal tersebut dapat dilakukan oleh pihak pemerintah Kecamatan dan instansi terkait lainnya yang dapat juga bekerjasama dengan pihak PT.Mifa Bersaudara dan perguruan tinggi.
3. Menciptakan dan Mengembangkan Usaha Produktif. Kegiatan usaha produktif diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang berarti penguatan masyarakat di bidang ekonomi. Jenis kegiatannya, bisa mengembangkan usaha produktif yang sudah ada, atau membuka bidang usaha baru. Penguatan masyarakat melalui pendekatan ekonomi akan dapat meningkatkan motivasi anggota dalam berkelompok karena sebagian kepentingan mereka dapat terpenuhi. Di pihak lain, keberhasilan dalam peningkatan ekonomi kelompok akan dapat memotivasi orang lain untuk ikut berkelompok. Sehingga keberhasilan kegiatan pendampingan dalam bidang ekonomi akan memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kegiatan-kegiatan selanjutnya. Hal ini harus dilakukan oleh pihak pemerintah kecamatan Tualang dengan bekerjasama dengan pihak PT.Mifa Bersaudara
4. Mengembangkan Sistem Informasi Masyarakat. Nilai-nilai strategis yang sesungguhnya dari mengembangkan sistem informasi masyarakat adalah penguatan masyarakat di

bidang informasi. Sistem informasi ini akan sangat membantu masyarakat dalam pembentukan jaringan antar lembaga atau kelompok-kelompok yang telah terorganisir melalui kegiatan pendampingan masyarakat. Sistem informasi yang dikembangkan juga akan menjadikan masyarakat mampu mengakses informasi ke dunia luar. Kekuatan masyarakat dalam mengakses informasi, dapat mempengaruhi seluruh aktifitas mereka yang pada akhirnya akan bermuara pada sustainable tidaknya komunitas mereka. Hal ini harus diupayakan oleh pihak pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat.

Pemberdayaan masyarakat harus dimulai dari rumah tangga yang mencakup aspek sosial, politik, dan psikologis. Pemberdayaan sosial adalah usaha memperoleh akses informasi, pengetahuan, keterampilan, partisipasi dalam organisasi sosial, dan sumber keuangan. Pemberdayaan politik adalah usaha untuk memiliki akses dalam proses pengambilan keputusan publik yang mempengaruhi masa depan mereka. Pemberdayaan psikologis adalah usaha bagaimana membangun kepercayaan diri bagi rumah tangga yang lemah (Wiranto, 2001).

b. Pemberdayaan Bidang Ekonomi

Dalam rangka membangun perekonomian masyarakat yang kuat, efisien, dan modern, terdapat lima agenda permasalahan yang harus diupayakan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat, yaitu: *Pertama*, mengoptimalkan peran pemerintah dalam membangun sektor usaha dan mekanisme pasar yang efisien. *Kedua*, meningkatkan posisi tawar masyarakat dalam merespon pasar. *Ketiga*, meningkatkan daya beli masyarakat dan meluncurkan pemasaran output secara efisien. *Keempat*, meningkatkan akses usaha masyarakat ke input produksi (modal, teknologi, lahan,

tenaga kerja). Kelima, menciptakan keterkaitan usaha besar dengan usaha masyarakat secara sinergis dan setara.

Agenda pertama

Penataan kebijakan pemerintah daerah agar dapat melaksanakan fungsi pelayanan dan pengaturan yang baik. Program-program CSR PT.Mifa Bersaudara di bidang peningkatan pendapatan masyarakat seharusnya didukung pihak pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat dengan cara mengupayakan berbagai program yang dijalankannya dapat berjalan efektif. Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat harus mampu bekerjasama dengan pihak swasta dan menjadi fasilitator dalam menggali dukungan dari pihak terkait lainnya seperti dari perguruan tinggi, LSM dan masyarakat khususnya. Fungsi pemerintah daerah antara lain meningkatkan pengaturan mekanisme pasar, menyediakan pelayanan barang dan jasa publik, pengelolaan sumberdaya alam untuk kemakmuran rakyat, dan penanganan masyarakat miskin.

Agenda Kedua

Kebijakan seyogyanya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan produksi dalam kegiatan usaha masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi menuju pada penguatan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah agar tumbuh dan berkembang. Proses produksi dan pemasaran dilakukan secara terorganisir oleh pelaku usaha kecil dengan bantuan kelompok usaha besar. Dengan adanya program CSR dari pihak PT.Mifa Bersaudara hendaknya dapat menjadi media untuk menciptakan hubungan industri yang baik antara usaha kecil masyarakat dan pihak usaha besar swasta.

Agenda Ketiga

Pemberian akses pada pelaku ekonomi yang lemah untuk mendapatkan input produksi meliputi lahan, modal, informasi pasar, keterampilan dan penguasaan teknologi, Pemberdayaan di bidang permodalan meliputi: (i) pemberian bantuan modal yang membangun kemandirian, (ii) penciptaan sistem permodalan yang kondusif bagi usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah untuk mendapatkan akses di lembaga keuangan, dan (iii) skema penggunaan atau kebijakan pengalokasian modal ini tidak boleh terjebak pada perekonomian subsistem.

Rendahnya kualitas masyarakat, tidak kuatnya permodalan, serta kemampuan penguasaan faktor produksi lainnya berpeluang untuk timbulnya konflik antara masyarakat ekonomi lemah dan kuat semakin besar. Dengan demikian, jika masalah pemberdayaan masyarakat tidak menyentuh aspek-aspek pemihakan dan kemitraan dalam pemanfaatan faktor produksi, maka dalam jangka panjang akan terjadi masalah sosial yang merugikan semua pihak.

Agenda Keempat

Berbagai upaya perlu dilakukan pihak pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat untuk membangun hubungan kerja atau *networking* kemitraan antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sebagai satu kesatuan ekonomi. *Networking* ini menjadi dasar pembangunan struktur usaha yang kokoh dan memiliki keterkaitan struktural yang kuat antar pelaku. Sinergi antar skala usaha ini akan memacu pertumbuhan dengan pemerataan. Pada gilirannya dapat dibangun perekonomian daerah yang sehat yang mampu tumbuh dan bersaing.

c. Pemberdayaan Bidang Sosial dan Politik

Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial dan politik perlu dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat. Pemberdayaan pada kedua bidang ini mencakup lima program yaitu: (i) peningkatan akses dalam pelayanan sosial dasar, kemampuan keswadayaan masyarakat, dan penyelarasan budaya produktif, (ii) pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik serta dalam mengontrol pelaksanaan pembangunan, (iii) pengoptimalan peran pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan peningkatan partisipasi masyarakat, dan (iv) pembagian peran dan tanggungjawab antara pemerintah, swadaya masyarakat dan dunia usaha.

d. Program Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat

Suatu keterkaitan program pengembangan perkonornian daerah yang efisien hanya dapat terjadi apabila terdapat kerangka kelembagaan untuk mendukungnya. Kerangka kelembagaan mampu mendukung adalah suatu kelembagaan kemitraan (kolaborasi) antara wakil-wakil dari pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat. Dalam hal ini, prakarsa dari pihak swasta diharapkan dapat berperan sebagai penggerak dalam mengidentifikasi dan melaksanakan segenap kegiatan dalam kelembagaan kemitraan yang dibentuk (Sutrisno, Fauzi dan Hariyadi, 200 I).

Untuk itu, dalam upaya mengembangkan networking dalam program pengembangan ekonomi masyarakat, terdapat empat lembaga ekonomi lokal yang erat kaitannya dengan pengembangan ekonomi lokal yang harus dikembangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat, yaitu lembaga usaha produksi, lembaga distribusi pemasaran, lembaga usaha/keuangan, dan lembaga keswadayaan masyarakat. Program peningkatan kapasitas lembaga-lembaga tersebut adalah sebagai berikut:

Lembaga Usaha Produksi

Terdapat tiga hal yang erat kaitannya dengan lembaga usaha produksi, yakni: teknologi produksi, komoditas unggulan lokal, dan sumberdaya manusia.

Teknologi Produksi

- Mendukung tercapainya skala usaha yang ekonomis bagi terwujudnya efektivitas dan efisiensi usaha.
- Menciptakan integrasi usaha hulu-hilir.
- Memotivasi lahirnya inovasi dan penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan nilai tambah suatu produk. Mendukung pemenuhan sarana peralatan produksi, dimana pada tingkat pascapanen, sarana (alat dan mesin) yang digunakan untuk memanfaatkan potensi daerah.

Komoditas Unggulan Lokal

- Penetapan komoditas unggulan lokal. Penetapan ini harus melibatkan berbagai unsur masyarakat untuk mendapatkan pertimbangan yang lebih obyektif dengan mempertimbangkan kekhasan (*comparative advantage*) suatu komoditas sehingga selain mempunyai nilai regional juga mempunyai nilai strategis dalam aspek pemasaran.
- Menciptakan sistem informasi yang mampu menyediakan data dan informasi tentang potensi lokal, peluang pasar, dan sistem penunjang keputusan (*Decision Support System / DSS*) yang dapat digunakan secara efektif untuk memilih komoditas dan bisnis unggulan daerah.

Sumberdaya Manusia

1. Prioritas pertama pengembangan SDM adalah kepada aparatur pemerintah daerah di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Hal ini dilakukan untuk memperkuat

lembaga birokrasi (Razak, 2001). Setelah itu diberikan kepada masyarakat dengan sasaran kelompok masyarakat, perusahaan dan LSM.

2. Memberikan pelatihan atau penyuluhan sistematis (*Business Development Service/ PT.Mifa Bersaudara*).
3. Mengembangkan jaringan kerjasama diantara berbagai lembaga, baik swasta maupun pemerintahan dalam menerapkan kegiatan.

Lembaga Distribusi Pemasaran

- a. Infrastruktur dan Sarana Produksi
 - Mendukung keterkaitan usaha produksi dengan praktek distribusi.
 - Membangun infrastruktur dan sarana distribusi, pola tataniaga dan perilaku pelakunya, serta pola pembagian marginnya,
- b. Kemitraan Usaha
 - Mensinergikan pola tataniaga dengan perilaku pelakunya untuk menjamin adanya pemerataan margin.
 - Penguatan kelembagaan produsen seperti koperasi pemasaran bersama.

Lembaga Keuangan dan Permodalan Usaha

- a. Lembaga Perbankan
 - Mengupayakan adanya suatu layanan khusus dalam penyaluran kredit ke UKM agar jumlah nasabah dapat meningkat sehingga dapat membantu UKM dalam mempercepat putaran usahanya.
 - Mengembangkan prosedur penilaian kelayakan (feasibility assessment) perbankan yang berlaku khusus bagi UKM.
- b. Lembaga Penjamin Kredit

- Membentuk Lembaga Penjamin Pembiayaan Usaha (LPPU) untuk memenuhi kebutuhan Modal Kerja Jangka Pendek (MKJP) bagi UKM.
- Menciptakan suatu sistem informasi yang akurat untuk menilai kejayaan suatu usaha, serta unit layanan teknologi dan bisnis untuk menjamin kinerja usaha yang telah didanai sesuai rencana.

Lembaga Swadaya Masyarakat

Berbagai lembaga keswadayaan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat yang terkait dengan perekonomian daerah, antara lain kelompok masyarakat, kelompok tani dan Kadinda.

- a. Mempertahankan tingkat keberlanjutan (sustainability lembaga keswadayaan)
- b. Meningkatkan tingkat partisipasi serta keuntungan bisnis yang diterima oleh partisipan. Kaneakaragaman Program Pembentukan Kelembagaan Kemitraan dan Jaringan

e. Kelembagaan Lobi dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Untuk mengimplementasikan *Community Based Development* yang berhubungan dalam suatu "keseimbangan dinamis" dengan *Local Government Policies* dalam program CSR, maka perlu dibentuk lembaga kemitraan di setiap tingkatan pemerintahan. Lembaga ini tidak saja berfungsi sebagai "catalist" antara pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan masyarakatnya, tetapi juga memiliki tugas utama, antara lain: (1) Mengelola dan mengembangkan unit-unit usaha produktif yang telah ditetapkan; (2) Mengatur mekanisme pengembangan modal usaha produktif; dan (3) Memfasilitasi pelaksanaan aktivitas pengembangan masyarakat (Tenny, 2002). Organisasi tersebut harus disponsori oleh instansi terkait dan melibatkan wakil-wakil

dari stakeholder. Wakil pihak pemerintah mesti staf yang bertanggung jawab untuk perencanaan manajemen, masalah-masalah hukum dan berhubungan dengan masyarakat. Begitu juga tokoh-tokoh yang antusias dengan CSR.

Pengembangan ekonomi lokal berorientasi pada peningkatan peranserta masyarakat dalam kegiatan ekonomi lokal melalui kegiatan yang dirancang oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat dengan menitikberatkan pada pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kelembagaan kemitraan. Kelembagaan ini perlu ada baik di desa, kecamatan, kabupaten/kota sampai tingkat provinsi dengan mengembangkan usaha-usaha kecil yang berbasis sumberdaya lokal sebagai objek pembinaan. Dalam rangka pemberdayaan kelembagaan ini, maka pihak pemerintah daerah di masing-masing tingkatan perlu diidentifikasi berbagai lembaga yang ada dan yang perlu, sehingga jaringan kerja pengembangan ekonomi masyarakat lokal dapat berjalan dan berkembang dengan baik.

Upaya pengembangan ekonomi lokal melalui pengembangan networking kolaboratif antara berbagai stakeholder dalam program CSR PT.Mifa Bersaudara mensyaratkan adanya kelengkapan kelembagaan kemitraan mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota sampai ke provinsi. Untuk itu, pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat perlu membentuk lembaga-lembaga kemitraan tersebut secara berjenjang sebagai berikut (Sutrisno et al., 2001):

- a. Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) merupakan kelompok masyarakat di tingkat desa yang terdiri dari petani, peternak, nelayan, pengrajin dan pelaku lokal lainnya yang berada di desa-desa.
- b. Tim Pelaksana Pengembangan Komoditas (TPPK) merupakan lembaga kemitraan di tingkat kecamatan yang bekerja secara bersama membantu pemberdayaan KMP.

- c. Forum Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (FKPEL) adalah lembaga yang merupakan wadah kemitraan, berfungsi sebagai forum musyawarah dan sekaligus sebagai pengambil keputusan di tingkat Kabupaten Aceh Barat.
- d. Unit Layanan Usaha (ULU) merupakan lembaga berbentuk unit kerja pennenan yang bertugas memberi jasa layanan konsultasi, pembinaan dan pengembangan kepada usaha-usaha kecil (termasuk KMP) baik dari aspek permodalan, produksi, manajemen maupun SDM.

Kontribusi kelembagaan kemitraan dalam pengembangan ekonomi lokal diharapkan bahwa nantinya dapat mengidentifikasi kompetensi ekonomi lokal dengan baik untuk kemudian dikembangkan menjadi usaha-usaha kecil yang berbasis pada sumberdaya lokal. Perihal pokok program ini adalah pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat, sehingga perlu diupayakan secara lebih baik proses sosialisasi dalam pembentukan dan keberadaan kelembagaan kemitraan, dimulai di tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota sampai dengan tingkat provinsi. Oleh karena itu semua program dan kegiatan perlu dituangkan dalam rencana tindak dan jadwal kerja yang dikomunikasikan dengan baik. Pembentukan kelembagaan kemitraan perlu dilakukan dengan berpedoman pada acuan umum sebagai berikut (Sutrisno et al, 2001):

- a. Kelembagaan KMP di tingkat desa perlu diadakan dengan mengacu pada potensi sumberdaya manusia di tingkat lokal dan karakteristik komoditas pilihan desa sasaran tersebut. Kelompok KMP perlu dijadikan sebagai basis dan pelaku utama dalam kegiatan pengembangan komoditas pilihan, dimana pada gilirannya diharapkan dapat merangsang dan menarik minat masyarakat dalam mengusahakan suatu komoditas. Kelompok sasaran dapat dibentuk melalui pertemuan formal yang dilakukan beberapa kali di tingkat

desa dengan melibatkan seluruh anggota dan unsur masyarakat. Pertemuan tersebut diharapkan dapat menghasilkan beberapa hal penting, antara lain: (1) identifikasi dan inventarisasi terhadap kelompok masyarakat yang benar-benar mengusahakan komoditas pilihan, dan (2) proses perekrutan dan seleksi berdasarkan kriteria yang disepakati. Selanjutnya, pertemuan internal KMP perlu diarahkan pada kegiatan yang bersifat non formal daJarn rangka mengembangkan diskusi kelompok untuk merumuskan kebutuhan dan kegiatan strategis pengembangan diskusi kelompok untuk merumuskan kebutuhan dan kegiatan strategis pengembangan komoditas pilihan.

- b. Lembaga kemitraan di tingkat kecamatan (TPPK) perlu dibentuk untuk memfasilitasi dialog serta tukar-menukar informasi dan pengalaman diantara KMP-KMP di wilayah kecamatan. Materi dialog dan peluang kemitraan antara lain mengenai informasi pasar, karakteristik komoditas pilihan, peluang diversifikasi, dan aspek-aspek lain yang dapat lebih mempercepat proses pengembangan ekonomi di tingkat kecamatan. Untuk meningkatkan efektifitas ketja TPPK, perlu dilibatkan unsur pengusaha, lembaga-lembaga keuangan lokal, koperasi, pemerintah daerah di tingkat kecamatan, dan wakil kelompok itu sendiri. Disamping itu, TPPK perlu melakukan pertemuan- pertemuan formal dan informal sesuai dengan kebutuhan, dan selanjutnya melakukan langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan.
- c. Lembaga kemitraan di tingkat kabupaten dan provinsi juga perlu dibentuk dan dikembangkan, sehingga jaringan kerja dan infonnasinya menjadi semakin luas. Disamping itu, adanya lembaga ini di tingkat kabupaten dan provinsi juga diharapkan dapat menjadi pengontrol sistem distribusi,

sehingga menjamin terjadinya pembagian margin tataniaga yang lebih adil. Lembaga besar dilibatkan, sehingga dapat melakukan fungsi penjamin pasar secara lebih baik. Disamping itu, keterlibatan dan keberpihakan pada program pengembangan ekonomi lokal dari pihak perbankan, LSM maupun pemerintah juga mesti diupayakan.

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan bagi keberhasilan dalam pengembangan ekonomi lokal tersebut adalah sebagai berikut (Sutrisno et al., 2001):

- a. Kelembagaan lokal yang sudah ada atau yang akan dibentuk seyogyanya mampu menampung semua aspirasi dari semua pelaku pembangunan (*stakeholder*). Lembaga ini di tingkat kabupaten dan provinsi akan membahas rumusan dan implementasi kegiatan dalam rencana tindak (*action plan*), serta memobilisasi sumberdaya dan dana kegiatan jaringan kerja usaha yang berasal dari pihak pemerintah, swasta dan masyarakat,
- b. Lembaga kemitraan di tingkat kabupaten adalah Lembaga yang di dalamnya melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta maupun masyarakat, diharapkan dapat lebih mengakses kepada kelompok sasaran yang menjadi induk perekonomian. Lembaga ini berkepentingan dalam pengambilan kebijakan yang berorientasi pada kelompok sasaran. Penentuan kluster komoditas unggulan adalah kesepakatan yang dihasilkan dari lembaga ini. Namun demikian, peranan pemerintah hendaknya sekecil mungkin (terbatas sebagai fasilitator), sementara peranan swasta/profesional perlu diupayakan seoptimal mungkin.
- c. TPPK perlu melibatkan berbagai unsur di dalam masyarakat, baik kelompok masyarakat pedesaan (petani, peternak dan

nelayan), swasta, lembaga kemasyarakatan, dan pemerintah daerah keamatan.

- d. TPPK harus menjalankan fungsinya untuk menyerap dan menampung aspirasi keompok sasaran untuk melakukan tindakan lebih lanjut yang di pert ukan , baik berupa koordinasi dengan lembaga kemitraan di tingkat kabupaten, maupun dengan lembaga-lembaga terkait lainnya. Dalam melaksanakan fungsinya TPPK dibantu oleh Fasilitator Kecamatan (FK), dengan selalu berkoordinasi dan rnemantau semua kegiatan FK agar target dan sasaran pembinaan dapat tercapai.

Terdapat beberapa prinsip yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam perumusan bentuk kelembagaan. Pertama, kelembagaan tersebut merupakan rnanifestasi dari "sharing" seluruh stakeholder, dimana peranan dari masing-masing stakeholder dalam kelembagaan tersebut (pola hubungan) dapat ditelaah secara kritis dan analisis pihak-pihak terkait. Telaahan ini penting terutama untuk menetapkan dimana kedudukan organisasi atau badan yang melaksanakan fungsi hubungan kelembagaan tersebut. Kedua. fokus pekerjaan kelembagaan tersebut adalah kepada program-program partisipatif yang telah dirumuskan dan diperkirakan secara operasional program-rogram tersebut dapat didukung dan difasilitasi oleh beragam kebijakan pemerintah daerah. Untuk memperkirakan hal tersebut diperlukan suatu "matriks" antara program-program partisipatif dengan prasyarat kebijakan pemerintah daerah. Keliga, kelembagaan tersebut baik secara konseptual maupun operasional rnampu mengimplementasikan kaidah-kaidah desentralisasi dan otonomi daerah yang telah ditetapkan pada satuan daerah kabupaten/kota (UU Nomor 22 dan 25 Tahun 1999). Prinsip ini penting, terutama untuk mendukung program-program partisipatif dan sampai sejauh

mana pemerintah daerah kabupaten/kota mampu membiayai beragam implementasi dari program-program partisipatif tersebut (Tonny, 2002).

f. Rancangan Program Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi dan Sosial Masyarakat

Dalam upaya membangun *networking* diantara berbagai stakeholder dalam program CSR yang bersinergis dengan program pembangunan daerah, khususnya di bidang ekonomi, maka perlu dibuat strategi kebijakan program pembangunan daerah untuk penguatan lembaga dan organisasi masyarakat. Hal tersebut diupayakan dengan mendukung pembentukan lembaga kemitraan antar stakeholder dan memperkuat lembaga perkoperasian. Lembaga kemitraan ini juga dapat menjadi dasar dari mengembangkan *networking* ekonomi yang efisien yang menghubungkan antara produsen, pemasok, pedagang, dan pembeli di daerah pedesaan dan perkotaan di seluruh daerah tersebut, bahkan di luar daerah yang bersangkutan

Komponen-komponen program prioritas yang dapat dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat adalah: (i) penghapusan peraturan yang menghambat berkembangnya lembaga dan organisasi sosial-ekonomi yang dapat dibentuk oleh masyarakat, (ii) penyediaan informasi kepada lembaga ekonomi-sosial masyarakat, (iii) pengembangan forum lintas pelaku dalam komunikasi dan konsultasi baik antara pemerintah dan lembaga masyarakat maupun antar lembaga masyarakat dalam kegiatan pengambilan keputusan

BAB 6

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

6.1. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal kegiatan tahapan lanjutan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- **Validasi model yaitu melakukan penelitian dengan menggunakan metode eksperimen antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen.**

Indikator capaian yang diharapkan adalah tersedianya rumusan aplikasi model pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batubara berbasis sinergisitas stakeholder dan manajemen ekoregion untuk menggerakkan ekonomi rakyat di Provinsi Aceh yang dipublikasi pada seminar dan jurnal internasional.

- **Seminar dan Lokakarya dalam kerangka sosialisasi aplikasi model pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batubara berbasis sinergisitas stakeholder dan manajemen ekoregion untuk menggerakkan ekonomi rakyat di Provinsi Aceh.**

Indikator capaian yang diharapkan adalah tersedianya aplikasi model pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batubara berbasis sinergisitas stakeholder dan manajemen ekoregion untuk menggerakkan ekonomi rakyat di Provinsi Aceh yang terdaftar pada lembaga HKI.

Jadwal kegiatan tahapan lanjutan penelitian ini adalah sebagai terlampir.

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Peran serta PT. PT. Mifa Bersaudara dalam upaya mengembangkan masyarakat dan mendukung pembangunan di Kabupaten Aceh Barat adalah melaksanakan Program Community Development (CD). Keterlibatan pihak pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat dalam program CD PT. Mifa Bersaudara adalah pada tahap perencanaan program CD, pelaksanaan program dan monitoring program. Peran serta masyarakat pada program CD PT. Mifa Bersaudara lebih banyak pada pelaksanaan program. Peran serta universitas terbatas pada perencanaan program CD. Sedangkan peranserta LSM dalam program CD. PT. Mifa Bersaudara belum ada.

Dalam penyelenggaraan program CD, selama ini PT. Mifa Bersaudara cenderung bekerjasama secara langsung dengan pihak masyarakat tanpa melibatkan stakeholder lainnya. Pola kerjasama lebih bersifat searah, dimana PT. Mifa Bersaudara sebagai pemilik program yang sasarannya adalah masyarakat sekitar perusahaan. Kerjasama secara nyata antara PT. Mifa Bersaudara dan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat dalam penyelenggaraan program CD masih kurang. Belum ada kelembagaan yang menjembatani hubungan keduanya, sehingga keterkaitan program CD PT. Mifa Bersaudara dan program pembangunan daerah relatif kecil. Meskipun Pemerintah Daerah sudah mengeluarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, namun belum Forum TJSLP masih dalam tahap persiapan untuk melaksanakan tugasnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjalannya *networking* diantara stakeholder dalam program CD PT. Mifa Bersaudara adalah: faktor hukum, peraturan daerah yang spesifik mengenai program *Community Development* (CD) di Kabupaten Aceh Barat belum ada. Tidak ada sistem insentif sosial yang diperoleh perusahaan yang melaksanakan program CD, begitu juga dengan konsekuensi bagi perusahaan yang tidak melaksanakannya; faktor politik, rumusan misi pembangunan Kabupaten Aceh Barat untuk mencapai visi yang berhubungan dengan program pengembangan masyarakat tidak ada yang spesifik terkait dengan program CD. Begitu juga tidak ada kebijakan pemerintah daerah yang dapat menjadi 'payung' untuk kegiatan CD yang diprakarsai oleh pihak swasta; faktor institusional, wadah komunikasi yang dapat menjembatani kepentingan dari semua stakeholder dalam program CD belum ada; faktor ekonomi, tidak ada anggaran khusus dari pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat untuk program pemberdayaan masyarakat. Dana program CD PT. Mifa Bersaudara hampir keseluruhannya berasal dari dana PMDH pihak perusahaan sendiri; faktor sosial-budaya, secara kultural masyarakat sekitar perusahaan bersikap pasrah. Struktur sosial masyarakat, sebagian besar masyarakat merupakan masyarakat menengah ke bawah dengan tingkat pendidikan rendah. Informasi dan pengetahuan mengenai program CD dari para stakeholder masih terbatasnya. Pihak pemerintah daerah menganggap bahwa pengembangan masyarakat di sekitar PT. Mifa Bersaudara lebih merupakan tanggung jawab pihak swastanya sendiri.

Secara umum, masing-masing pihak terkait memandang penting kolaborasi *stakeholder* dalam penyelenggaraan program CD. PT. Mifa Bersaudara. Kolaborasi *stakeholder* diperlukan untuk dapat menutup gap yang timbul dalam hal tenaga, *expertise*, dana, dan lain sebagainya yang diperlukan dalam pelaksanaan program. Dengan kolaborasi juga kondisi, kebutuhan dan rencana dari masing-masing pihak dapat diketahui, sehingga masing-masing stakeholder dapat

berkontribusi secara optimal sesuai dengan fungsi, kapasitas dan kapabilitasnya.

Untuk mendukung kolaborasi diantara stakeholder, pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat harus berupaya memaksimalkan layanan, agar interaksi setiap stakeholder dalam program CD berjalan baik. Semua stakeholder harus didukung oleh pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam program CD PT. Mifa Bersaudara, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengawasan dan pengevaluasian. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus merupakan fasilitator pembangunan yang dapat menjembatani kerjasama antara pihak swasta dengan masyarakat. Untuk itu, secara hukum diperlukan adanya peraturan-peraturan daerah (Qanun) yang spesifik mengenai program CD. Peraturan ini menyangkut ketentuan mengenai siapa saja yang bertanggung jawab terhadap program CD, apa hak dan tanggung jawab masing-masing pihaknya. Untuk lebih mendukung pelaksanaan program partisipatif tersebut, perlu ditentukan juga sistem insentif bagi SH yang mendukung program dan konsekuensi bagi SH yang tidak menjalankannya. Secara politik, diperlukan komitmen dan keranian politik yang kuat dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat terhadap upaya-upaya pengembangan masyarakat. Program seyogyanya merupakan bagian penting dari RENSTRA (*strategic planning*) kabupaten. Secara kelembagaan, pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat perlu melakukan pengorganisasian terhadap keterlibatan para SH yang berkontribusi dalam upaya pengembangan masyarakat dan terhadap interaksi lembaga-lembaga pemerintah dengan SH non-pemerintah. Untuk itu diperlukan adanya suatu kelembagaan yang berfungsi sebagai koordinator dan fasilitator dari kolaborasi antara berbagai SH. Secara ekonomi, mesti ada anggaran khusus dari pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat untuk program CD, disamping mengefektifkan partisipasi pihak swasta. Secara sosial

budaya, pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat bertanggungjawab untuk memastikan bahwa program CD yang ada strategis dan dipahami semua stakeholder.

Untuk mengimplementasikan *Community Based Development* yang berhubungan dalam suatu "keseimbangan dinamis" dengan *Local Government Policies* dalam program CD PT. Mifa Bersaudara, maka perlu dibentuk kelembagaan kemitraan di setiap tingkatan pemerintahan. Kelembagaan perlu dibentuk secara berjenjang sebagai berikut, yaitu: (1) Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP) merupakan kelompok masyarakat di tingkat desa. (2) Tim Pelaksana Pengembangan Komoditas (TPPK) merupakan lembaga kemitraan di tingkat kecamatan yang bekerja secara bersama membantu pemberdayaan KMP. (3) Forum Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (FKPEL) adalah lembaga yang merupakan wadah kemitraan, berfungsi sebagai forum musyawarah dan sekaligus sebagai pen gam bil keputusan di tingkat Kabupaten Aceh Barat. (4) Unit Layanan Usaha (ULU) merupakan lembaga berbentuk unit kerja permanen yang bertugas memberi jasa layanan konsultasi, pembinaan dan pengembangan kepada usaha-usaha kecil (ternasuk KMP) baik dari aspek permodalan, produksi, manajemen maupun SDM.

Strategi untuk mensinergikan Program Pengembangan Masyarakat dan Pembangunan Daerah dapat diupayakan dengan "menjembatani" kelembagaan pemerintah dengan kelembagaan masyarakat oleh pihak pernerintah Kabupaten Aceh Barat. Untuk menjembatani kedua kelembagaan tersebut diperlukan suatu proses pem.aduan kelembagaan, Pemanduan kelembagaan pemerintah dengan kelembagaan masyarakat melalui peningkatan daya tanggap lembaga pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat.

7.2. Saran

Networking colaboratif dalam pelaksanaan program CD menuntut perubahan paradigma pihak pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat dalam hal sikap dan orientasinya. Perubahan tersebut menyangkut peran pemerintah daerah yang semula berperan majemuk (mendistribusikan SDA, merencanakan, menentukan regulasi dan mengawasinya) menjadi lembaga yang memberikan dukungan (fasilitas). Dengan kata lain, pemerintah daerah semula menjadi "pengusa tunggal" sekarang menjadi "pelayan".

Begitu juga dengan perubahan sikap menghadapi masyarakat. Masyarakat harus dihadapi sebagai pelaku yang memiliki kedudukan sederajat dengan pemerintah daerah. Sikap ini dituntut dalam setiap pembuatan keputusan, yang semula bersifat unilateral dari pihak pemerintah saja, kini harus bersifat partisipatif. Penentuan kebijakan dan rencana pembangunan daerah secara partisipatif tidak selalu cukup dengan hanya melibatkan DPRD. Pada realitanya, DPRD tidak selalu dapat merepresentasikan aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Oleh sebab itu, mesti ada mekanisme yang diatur pihak pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kebutuhan dan keinginan masyarakat terakomodir dalam setiap program pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams and Someshwar. 1996. *Social Capital and Development: Implications for policy and Program*. Paper. Tidak diterbitkan.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 2012. *Potensi Investasi Provinsi Aceh Tahun 2012*.
- Badaruddin. 2003. *Modal Sosial dan Reduksi Kemiskinan Nelayan di Propinsi Sumatera Utara*. Penelitian Hibah Bersaing Perguruan Tinggi. Dikti. Tidak diterbitkan.
- _____. 2006. *Modal Sosial dan Pengembangan Model Transmisi Modal Sosial Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (Studi Pada Tiga Komunitas Petani Karet di Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Sumatera Barat)*. Penelitian Hibah Bersaing Perguruan Tinggi. Dikti. Tidak diterbitkan.
- Baiquni, M. dan Susilawardani. 2002. *Pembangunan yang Tidak Berkelanjutan: Refleksi Kritis Pembangunan Indonesia*. Yogyakarta: *ideas dan Trans Media Global Wacana*.
- Bali Post, 9 Februari 2007.
- Bethan, Syamsuharya. 2008. *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional*. Bandung: PT Alumni.
- Biro Lingkungan dan Teknologi DPE. 1998. *Pelaksanaan AMDAL Kegiatan Pertambangan dan Energi*. Jakarta.
- Branch, Melville.C. (1995). *Perencanaan Kola Komprehensif*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

- Briggs, John, and Mwamfupe, Davis. (2000) *Peri-Urban Development in an Era of Structural Adjustment in Africa : The City of Dar es Salaam, Tanzania*. Urban Studies, Vol.37, No.4, 797-809.
- Brook, Robert., Davila, Julio. (2000), *The Peri-urban Interface. A Tale of Two Cities* arc.cs.odu, edu :8080/dp9/ getrecord/oai_dc/eprints.ucl.ac. uk. 0 AI21oai: eprints. ucl.ac. uk .OAI2:40 - 6k -
- Browder, John O. and Bohland, James R. (1990) Patterns of Development on The Metropolitan Fringe. *Journal of the American Planning Association*; Summer 95, Vol. 61 Issue 3, p3 !0, 18p, 3 charts.
- Bryant., Russwurm., McLellan. (1992), *THE CITY'S COUNTRYSIDE Land and its management in the rural-urban fringe*, Longman Inc., New York, United States of America.
- Chambers, Robert. 1988. *Pembangunan Desa: Mulai Dari Belakang*. Jakarta: LP3ES.
- Coleman, James S. 1988. *Foundations of Social Theory*. Cambridge: Harvad University Press.
- Dasgupta, Partha dan Ismail Serageldin (ed.). 1999. *Social Capital: A Multifaceted Perspective*. Washington: The World Bank.
- Departemen Pertambangan dan Energi.1995.50 Tahun *Pertambangan dan Energi Dalam Pembangunan*. Jakarta.
- Effendi, Hefni. 2011. *Senarai Bijak Terhadap Alam dan Inspiratif dalam Gagasan*. Bogor: PT Penerbit IPB Press.
- Fukuyama, Francis. 1995. *Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity*. New York: The Free Press.

- Gall, M. Borg, W. (2003), *Educational research an introduction*.
Colopon, United States of America
- Grootaert, Christian. 1998. *Social Capital: The Missing Link? Social Capital Initiative*. Working Paper. No. 3. World Bank.
- Gunawan, Totok. 27 Oktober 2007. *Makalah: Pendekatan Ekosistem Benteng Lahan Sebagai Dasar Pemba-ngunan Wilayah Berbasis Lingkungan di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Seminar Nasional Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.
- <http://geo.ugm.ac.id/>
- <http://hmit.wordpress.com>
- <http://www.menlh.go.id>
- Ibrahim, Linda D. 2006. Memanfaatkan Modal Sosial Komunitas Lokal Dalam Program Kepedulian Korporasi. Dalam *Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani GALANG*. Vol. 1. No. 2.
- Jahja, Rusfadia Saktiyanti. 2006. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Corporate Social Responsibility Perusahaan Ekstraktif (Sebuah Studi Komparasi Pelaksanaan CSR di Perusahaan Pulp dan Kertas di Propinsi Riau dan Perusahaan Tambang Batubara di Propinsi Kalimantan Timur). Dalam *Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani GALANG*. Vol. 1. No. 2.
- Kompas, Jumat, 28 Oktober 2011.
- Kotler, Philip dan Nancy Lee. 2005. *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

- Kolopaking, Lala. 2002. *Modul Kuliah Pengembangan Masyarakat dan Kelembagaan Pembangunan*. Program Magister Manajemen Pembangunan Daerah Triwulan I. Pekanbaru, Riau.
- Krishna, Anirudh & Norman Uphoff. 1999. Mapping and Measuring Social Capital: A Conceptual and Empirical Study of Collective Action for Conserving and Developing Watersheds in Rajashtan, India. *Social Capital Initiative Working Paper. No. 13. World Bank*.
- Iaquinta, David L., Drescher Axel W. (2000), *Defining Periurban: Understanding Rural-Urban linkages and Their Connection to Institutional Contexts*, presented at the Tenth World Congress, IRSA, Rio, August 1, 2000.
- Lubis, Zulkifli. 2002. *Resistensi, Persistensi, dan Model Transmisi Modal Sosial Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Milik Bersama: Kajian Antropologis Terhadap Pengelolaan Lubuk Larangan di Sumatera Utara*. Proyek RUKK-I. Menristek. Laporan Penelitian.
- Mackie, Jamie, 1998. *"Business Success Among Southeast Asian Chinese: The Role of Culture, Values, and Social Structures*.
- Mawardi, Ikhwanuddin. 28 Desember 2010. *Pembangunan Yang Berorientasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (Kasus Pulau Jawa)*. Blog Bappenas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. <http://www.bappenas.go.id>
- Nursahid, Fajar. 2006. Praktik Kedermawanan Sosial BUMN: Analisis Terhadap Model Kedermawanan PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan PT Telekomunikasi Indonesia.

- Dalam *Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani GALANG*. Vol. 1. No. 2.
- Ohama, Yutaka. 2001. *“Conseptual Framework of Participatory Local Social Development (PLSD)”*. Modul dalam training on PS LD. Theories and Practices. Nagoya: JICA.
- Ostrom, Elinor. 1993. *Crafting Institution, Self-Governing Irrigation Systems*. San Fancisco: ICS Press.
- Prasodjo, Imam B. 2001. *Menciptakan Harapan di Negeri Azab*. Makalah. Tidak dipublikasikan. Jakarta: CERIC FISIP – UI.
- Pretty, Jules dan Hugh Ward. 1999. *Social Capital and The Environtment*. Paper Submitted to World Bank.
- PT. Bank Mandiri (Persero), 2013. *Industry / Update, Office of Chief Economist, Volume 11, June 2013, 3 July, 2013*.
- Pusat Sumber Daya Geologi, 2006.
<http://www.tekmira.esdm.go.id/data/files/Batubara%20Indonesia.pdf>.
- Puslitbang Teknologi Mineral dan Batu Bara (TekMIRA), 2006.
Konsumsi Batu Bara Menurut Jenis Industri di Indonesia.
<http://www.tekmira.esdm.go.id/data/files/Batubara%20Indonesia.pdf>
- Putnam, Robert D. 1993. *Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press.
- Rose, Richard. 1999. *“Getting Things Done in an Antomodern Society: Social Capital Networks in Rusia”*. Dalam Partha Dasgupta dan Ismail

- S.W. Sumardjono, Prof. Maria, dan Dwi Diantoro, Totok. 2009. *Naskah Akademis: Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis*.
- Saleng, Abrar. 2004. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press.
- Salman, Darmawan; Laude Sufri; Amin Daud Aidir; dan Mappinawang. 1999. *Kreasi Modal Sosial Melalui Aksi Kolaborasi Dalam Reduksi Kemiskinan*. Makalah Seminar dan Lokakkarya. Makassar: Kerjasama LP3M, FE Unhas dan Oxfarm Jakarta.
- Semendawai, A.H. 2005. *Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam RUU KUHP, ELSAM*. Jakarta.
- Serageldin (ed.). *Social Capital: A Multifaceted Perspective*. Washington: The World Bank.
- Steiner, George A. Dan John F. Business Steiner. 1994. *Business, Government, and Society: A Managerial Perspective, Text and Cases*. Singapore: McGraw-Hill Book Co.
- Subadi. 2010. *Penguasaan dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R. 2003. *Kitab Undang-Undang Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Sudrajat, Nandang. 2010. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*. Jakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Sukmadinata, N.S. (2000), *Pengembangan Model : Teori dan praktek*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Sunarso, Siswanto. 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta. Jakarta.

- Suprpto, Siti Adiprigandari Adiwoso. 2006. Pola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lokal di Jakarta. Dalam *Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani GALANG*. Vol. 1. No. 2.
- Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pasal 33 ayat (3).
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)* beserta peraturan pelaksanaannya.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara (UUPMB)* beserta peraturan pelaksanaannya.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria* beserta peraturan pelaksanaannya.
- Webster, Douglas. (2002), *On the Edge: Shaping the Future of Peri-urban East Asia*, Working paper.
- Webster, Douglas dan Larissa Muller (2002), *Challenges of Peri-urbanization in the Lower Yangtze Region: The Case of the Hangzhou-Ningbo Corridor*, Asia/Pacific Research Center, Stanford University, Stanford.
- Wibowo, Pamadi. 2006. Rentang Program CSR di Mata Para Ahli Pemasaran. Dalam *Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani GALANG*. Vol. 1. No. 2.
- Widiyanarti, Tantry. 2004. *Persepsi Pelaku Bisnis Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi pada Beberapa Perusahaan Swasta di Jl. Jendral Sudirman Jakarta)*. Jakarta: Pusat Pengembangan Etika Unika Atmajaya. Tidak Diterbitkan.
- _____. 2005. Corporate Social Responsibility: Model Community Development Oleh Korporat. Dalam *Etnovisi*

Jurnal Antropologi Sosial Budaya. LPM ANTROP- FISIP-USU. Vol 1. No.2.

World Coal Institute, 2005. *Sumber Daya Batu Bara, Tinjauan Lengkap Mengenai Batu Bara.* www.worldcoal.org.

Penelitian ini difokuskan pada pengujian dan sosialisasi model pemberdayaan masyarakat sekitar tambang batu bara berbasis sinergisitas stakeholders (Pemerintah, Perguruan Tinggi/Civil Society/LSM, dan Korporat-CSR) sebagai alternatif solusi dalam menggerakkan ekonomi rakyat, pemberantasan kemiskinan dengan memanfaatkan potensi modal sosial dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis manajemen ekoregion (Green Economic) di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan metode survey melalui wawancara secara partisipatif, FGD & indepth interview terhadap 250 responden yang mewakili setiap stakeholder. Metode analisis data menggunakan Metode Rapid Assessment for Local Economic Development (RALED) dan Metode Participatory Rural Appraisal (PRA). Hasil penelitian tahun pertama menunjukkan rasing-rasing pihak terkait memandang penting kolaborasi stakeholder dalam penyelenggaraan CD. PT. Mifa Bersaudara. Kolaborasi stakeholder diperlukan untuk dapat menutup gap yang timbul dalam pelaksanaan program. Hasil penelitian tahun kedua menunjukkan bahwa pengelolaan program Community Development PT. Mifa Bersaudara cenderung dilakukan oleh pihak perusahaan secara sendiri dengan tingkat pelibatan stakeholder lainnya yang masih minim dan pola kerjasama lebih bersifat searah. Kerjasama PT. Mifa Bersaudara dan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat terbatas pada koordinasi. Kerjasama PT. Mifa Bersaudara dengan perguruan tinggi hanya terbatas pada tahap perencanaan program. Belum ada kerjasama antara LSM dengan PT. Mifa Bersaudara dalam program CD. Secara hukum diperlukan adanya peraturan daerah (Qanun) yang spesifik mengenai program CD.

UNIMAL PRESS

